Perempuan Dan Anak Dalam Situasi Khusus

 ( Studi Kasus Di Kabupaten Tulungagung)

Peneliti : Nur Aini Latifah, SE.MM.

**Penelitian Kompetitif Individual**

**Kementrian Agama RI**

**2011**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Salah satu program Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004 – 2009, adalah **”Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak”** yang telah direncanakan dalam Peraturan Presiden Nomor  7 Tahun 2007. Masalah utama dalam pembangunan pemberdayaan perempuan adalah rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik. Sedang untuk kegiatan Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak bertujuan untuk mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berahlak mulia, serta melindungi anak terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan sangat diperlukan karena kualitas kehidupan perempuan masih jauh lebih rendah daripada laki-laki. Demikian pula halnya dengan anak, yang merupakan generasi penerus, perlu ditingkatkan kesejahteraan dan pelindungannya. Secara umum, pembangunan pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak telah menunjukkan hasil yang menggembirakan, tetapi berbagai permasalahan masih dihadapi, seperti masih tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta masih adanya kesenjangan pencapaian hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki, yang tercermin dari masih terbatasnya akses sebagian besar perempuan ke layanan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas.

Pasca Perang Dunia I dan II berbagai reaksi muncul atas penderitaan yang muncul akibat bencana perang terutama yang dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak. Reaksi ini mendorong munculnya beberapa Deklarasi PBB untuk mendukung penghormatan terhadap hak asasi manusia termasuk secara spesifik terhadap anak dan kaum perempuan.

Kemiskinan dan pengangguran juga masih menjadi isu utama yang mengiringi Indonesia yang sedang berupaya menuju proses perbaikan. Setidaknya, 37,4 juta penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Jumlah tersebut belum termasuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Papua. Dampak sosial yang terlihat jelas dan nyata adalah mereka, orang-orang miskin tersisih dalam pembangunan .

Selain itu, juga masih banyaknya hukum dan peraturan perundang-undangan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan, dan belum peduli anak. Masalah lain adalah masih lemahnya kapasitas kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, terutama di tingkat kabupaten/ kota. Untuk itu, perlu diambil langkah-langkah kebijakan untuk mengatasinya dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan pelindungan anak.

Anak dan Perempuan merupakan kelompok rentan, sehingga memerlukan perlindungan khusus. Beberapa kekacauan sosial yang dipicu karena krisis ekonomi, bencana alam, perang dan konflik sosial sangat berdampak luar biasa terhadap anak dan perempuan. Korban luka maupun meninggal banyak menimpa anak dan perempuan karena fisik mereka yang lebih lemah, anak- anak kehilangan kesempatan bersekolah, perempuan membanting tulang untuk bertahan hidup bahkan mereka rawan menjadi korban trafiking yang memanfaatkan situasi kacau di masyarakat. Perlakuan khusus pada anak didasarkan karena mereka belum matang secara fisik dan mental, sehingga membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus yang layak sebelum dan sesudah kelahirannya.

Perempuan dan anak-anak dalam situasi khusus merupakan korban terbesar dari pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pelanggaran Hak Asasi terhadap perempuan dan anak ini
akan semakin nyata dalam situasi masyarakat yang tidak menentu
seperti perang, konflik atau bencana alam, seperti yang terjadi di Aceh dan
Sumatera Utara beberapa waktu yang lalu. Pada bencana Tsunami di
Aceh misalnya, beberapa tahap penanganan korban bencana, perempuan
dan anak telah mengalami pelanggaran hak asasinya mulai dari tahap
Emergency Respon dan tahap rehabilitasi.

Menurut AS Hikam, masalah pelanggaran hak asasi perempuan ini juga terbesar
terjadi dalam sektor buruh migran yang mayoritas adalah perempuan. Banyak
sekali korban buruh migran perempuan, namun negara tidak bisa memberi
perlindungan seutuhnya. Akibat tidak ada perlindungan ini, maka korban
pelanggaran hak asasi pada buruh migran perempuan ini jumlah akan semakin
membesar. Pelanggaran-pelanggaran hak asasi perempuan tidak saja terjadi diruang publik.
Dalam ruang domestik, perempuan juga paling besar terlanggar hak asasinya.
Dalam konteks ini maka, perempuan dalam banyak kesempatan mengalami korban
kekerasan secara berganda. Ia tidak saja menjadi korban fisik, tetapi juga
psikis, sosial dan budaya dalam masyarakat patriarkhi.

Berkaitan dengan sejumlah kasus-kasus yang terjadi terhadap perempuan dan anak,
menurut Hikam perlu dibuat ketentuan hukum yang lebih spesifik untuk menegakkan
hak asasi perempuan. Ketetapan hukum ini tidak bisa dibuat secara umum, karena
problem-problem perempuan dan anak biasanya terjadi dengan spesifikasi
tertentu, tidak bisa generalisir. Untuk itu, Hikam menyarankan perlu adanya
paradigma baru dalam konteks penanganan perempuan dan anak korban pelanggaran
hak asasi ini secara lebih inklusif, lebih menyeluruh, agar masalah-masalah
yang menimpa perempuan dan anak dapat terakomodasi dengan baik.

**A.1. Respon Global terhadap Perlindungan Anak dan Perempuan**

Komitmen Dunia mengenai 8 Sasaran Pembangunan Milenium (Millenium Development Goal’s 2015) yaitu :

1. Hapusnya kemiskinan.
2. Pendidikan dasar untuk semua.
3. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
4. Mengurangi angka kematian bayi dan anak.
5. Memperbaiki kesehatan ibu
6. Memerangi HIV & AIDS dan penyakit menular lainnya
7. Jaminan keberlanjutan lingkungan hidup
8. Kemitraan global untuk pembangunan

Demikian pula dalam keputusan PBB, terdapat 2 (dua) konvensi penting yang berkaitan dengan Anak dan Perempuan yang disepakati dunia melalui PBB merespon berbagai bentuk perlakuan salah terhadap anak dan perempuan yang terjadi baik berbasis konflik maupun budaya lokal. Kedua konvensi tersebut adalah :

1. Konvensi Hak Anak (CRC/ Children Right Convention) diadopsi oleh Majelis Umum PBB 20 Nopember 1998, kemudian berlaku sebagai hukum internasional pada tanggal 2 September 1990.
2. Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW/ Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) dideklarasikan tahun 1979

Disamping itu ada konvensi yang melindungi anak dalam situasi khusus yaitu Konvensi ILO no 138 (*Concerning Minimum Age for Admission to Employment*)tentang Batasan Usia Minimum Bekerja yang diratifikasi dengan UU no 20 tahun 1999 dan Konvensi ILO no 182 (*Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of Worst Forms of Child* Labour) tentang Pelarangan dan Tindakan Segara untuk Menghapus Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA) yang diratifikasi dengan UU no 1 tahun 2000.

Berbagai upaya yang ditujukan bagi perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia merupakan hal yang sangat strategis sehingga memerlukan perhatian dari seluruh elemen bangsa. Dalam Garis Garis Besar Haluan Negara 1999 -2004 ditetapkan, bahwa salah satu misi dari pembangunan nasional adalah menempatkan HAM dan supremasi hukum sebagai suatu bidang pembangunan yang mendapatkan perhatian khusus. Untuk maksud itu diperlukan perwujudan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan HAM yang berlandaskan keadilan dan kebenaran. Menurut Pasal 8 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab pemerintah disamping juga masyarakat.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan dan meratifikasi berbagai konvensi, seperti konvensi hak anak, konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan lain-lain, tetapi belum didukung dengan komitmen bersama yang kuat untuk menerapkan instrumen-instrumen tersebut. Berdasarkan keadaan tersebut, maka perlu dikembangkan suatu mekanisme pelaksanaan hukum yang efektif untuk melindungi hak-hak warga masyarakat, terutama hak-hak kelompok rentan.

Pengertian Kelompok Rentan tidak dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, seperti tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan, antara lain, adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Sedangkan menurut Human Rights Reference disebutkan, bahwa yang tergolong ke dalam Kelompok Rentan adalah: a. Refugees, b, Internally Displaced Persons (IDPs); c. National Minorities, d. Migrant Workers; e. Indigenous Peoples, f. Children; dan g. Women.

CRC – Children Right Convention yang diratifikasi Indonesia dengan Keputusan Presiden no 36 tahun 1990. Empat prinsip dalam perlindungan anak adalah :

1. Non Diskriminasi

 Semua hak yang diakui oleh konvensi hak anak harus diperlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun atau universalitas.

1. Yang terbaik bagi anak (best interest of the child)

 Dalam setiap tindakan menyangkut anak, maka yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama

1. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak (survival and development)

 Hak hidup yang melekat pada diri setiap anak harus diakui dan bahwa hak anak atas kelangsungan hidup dan perkembangannya harus dijamin.

1. Penghargaan terhadap pendapat anak (respect for the views of the child)

 Pendapat anak terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatihan dalam setiap pengambilan keputusan.

CEDAW - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women yang diratifikasi Indonesia pada tahun 1984 melalui UU RI no 7 tahun 1984. Perlindungan dan promosi hak – hak perempuan di dalam CEDAW didasarkan atas 3 prinsip, yaitu :

1. Kesetaraan Subtansi

Kesetaraan dalam kesempatan, akses serta hasil dan manfaat. Sasaran pendekatan subtansi untuk memastikan hal-hal yang dihasilkan dari undang-undang, kebijakan, dan program responsif gender.

1. Non Diskriminasi

”Dikriminasi terhadap perempuan” berarti setiap pembedaan, pengecualian/ pengesampingan atau pembatasan yang dilakukan berdasarkan jenis kelamin yang mempunyai dampak atau maksud yang merugikan atau menihilkan pengakuan terhadap kepemilikan dan penggunaan, atau pelaksanaan oleh perempuan dari hak-hak sebagai manusia dan kebebasan mendasar di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya berlandaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

1. Kewajiban Negara

Dengan meratifikasi CEDAW , negara-negara peserta wajib untuk :

* + Mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan dalam semua bentuknya dengan mengambil upaya yang tepat untuk merealisasikan hal tersebut.
	+ Memasukkan prinsip kesetaraan dalam sistem hukum, mencabut semua undang-undang yang bersifat diskriminatif dan menetapkan undang-undang yang tepat yang melarang diskriminasi.
	+ Membentuk lembaga publik yang menjamin kepastian perlindungan efektif dan memastikan penghapusan semua perbuatan diskriminasi terhadap perempuan oleh orang, organisasi dan perusahaan.
	+ Memastikan bahwa organisasi-organisasi swasta, perusahaan-perusahaan dan individu-individu mewujudkan dan melindungi hak-hak perempuan.

**A.2. Kebijakan Nasional berkaitan dengan Anak dan Perempuan**

Disamping segala bentuk ratifikasi, pemerintah Indonesia juga mengeluarkan beberapa regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak dan perempuan atau berkaitan issu dengan khusus. Beberapa Produk Perundangan yang dihasilkan diantaranya :

* UU RI no 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;
* UU RI no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
* UU RI no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang di dalamnya memuat batasan mempekerjakan anak;
* UU RI no 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
* UU RI no 23 tahun 2006 Administrasi Kependudukan yang memuat pelayanan gratis akta kelahiran bagi anak baru lahir hingga 60 hari kerja;
* UU RI no 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Keluarnya segala produk perundangan ditindaklanjuti dengan program strategis yang tersusun dalam Rencana Strategis Nasional, yang menjadi mandat bagi berbagai bentuk kelembagaan yang menangani isu anak dan perempuan. Beberapa RAN (Rencana Aksi Nasional) yang telah disusun berkaitan dengan penghapusan BPTA (Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak) oleh Departemen Tenaga Kerja, ESKA (Eksploitasi Seks Komersial Anak) oleh Departemen Sosial, Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Akta Kelahiran 100% tahun 2011 oleh Departemen Dalam Negeri. Pada semua RAN melibatkan beberapa stakeholder dari pemerintahan dan LSM sebagai pelaksana.

**C. Fokus Penelitian**

Yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah :

1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kondisi perempuan dan anak dalam situasi khusus?

2. Upaya pencegahan dan perlindungan apa saja yang telah dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah dalam mengatasi persoalan perempuan dan anak dalam situasi khusus di Kabupaten Tulungagung?

3. Bagaimana gambaran perempuan dan anak dalam situasi khusus di Kabupaten Tulungagung?

**D. Pembatasan Masalah**

Dan fokus kajian ini terbatas pada perempuan dan anak yang :1. Tidak memiliki akta kelahiran; 2. Korban eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual; 3. Korban kekerasan; 4. Korban trafiking; 5. Terlibat dalam konflik hukum; 6. Mengalami kehamilan tidak dikehendaki; 7. Beresiko terhadap HIV & AIDS; 8. Penyandang cacat; 9. Tidak mempunyai wali/terlantar/yatim piatu. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tulungagung.

**E. Signifikansi Masalah**

Kajian tentang perempuan dan anak dalam situasi khusus sangatlah penting untuk dilakukan karena persoalan, kondisi dan situasi khusus yang melingkupi anak dan perempuan sangat mungkin terjadi disekitar kita terutama dalam ruang lingkup keluarga dan masyarakat. Jika kondisi tersebut dibiarkan atau dinafikan maka yang terjadi adalah diskriminasi, subordinasi, marginalisasi serta bias gender pada perempuan dan anak yang kemudian berakibat pada semakin menguatnya budaya patriarkhi pada masyarakat. Kesenjangan tersebut akan menjadi sebuah persoalan terutama tentang pelanggaran hak asasi manusia.

Pelanggaran hak asasi manusia di negara manapun akan mendapat reaksi negatif dan perlawanan dari dunia bahkan mungkin akan diisolasi dari percaturan dunia. Karenanya perlakuan yang tidak sepantasnya pada perempuan dan anak harus dikikis habis pada masyarakat kita agar terjadi masyarakat yang adil dan setara antara laki-laki dan perempuan. Dan anak sebagai generasi penerus bangsa mendapatkan **hak** dan perlindungan dari orang tua, masyarakat dan pemerintah, agar kelak keberlanjutan negara ini dapat dijamin dari anak-anak yang sehat, cerdas dan potensial.

**F. Kajian Riset Sebelumnya**

Kajian tentang perempuan dan anak dalam situasi khusus dilakukan oleh LPA Tulungagung (2010), dengan tema Menjangkau *Masyarakat Untuk Kesejahteraan Anak Dan Perempuan*, sebagai panduan bagi pekerja social masyarakat dalam menangani dan melakukan pendampingan pada perempuan dan anak-anak yang mengalami masalah dan dalam situasi khusus. Dari kajian yang telah dilakukan oleh LPA Tulungagung, peneliti mendapatkan data-data penunjang yang akan memperkaya dan memperkuat kajian tentang Perempuan dan Anak Dalam situasi khusus.

Kajian lain yang membahas tentang perempuan dan anak dalam situasi khusus, yang dilakukan oleh Jarak dkk. (2005), adalah “*Penguatan institusi Penghapusan Trafiking Perempuan dan anak Di Jawa Timur”* juga menjadi referensi dalam membahas Perempuan dan Anak Dalam Situasi Khusus. Kajian tersebut lebih memfokus pada permasalahan trafiking yang menimpa perempuan dan anak terutama yang terjadi di wilayah Propinsi Jawa Timur. Dalam kajian tersebut dipaparkan tentang upaya-upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam mencegah, dan menghapuskan trafiking di Propinsi Jawa Timur dan diharapkan menjadi rujukan bagi para stakeholder dalam mengembangkan program penghapusan trafiking serta menjadi media belajar bagi propinsi-propinsi lain dalam mengembangkan komite dan program penghapusan trafiking.

Penelitian yang berjudul “*Anak Rawan, Bunga Rampai Tentang Anak-Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus”*, telah dilakukan oleh Sri Sanituti H., Bagong Suyanto dan Sinung D.K.(2000). Penelitian ini menyajikan tentang potret buram dan berbagai permasalahan yang dihadapi anak-anak rawan di tanah air. Dalam kajiannya disebutkan bahwa isu-isu tentang anak rawan umumnya hanya dipahami dan diasumsikan secara parsial, dan akan terselesaikan dengan sendirinya jika persoalan kesejahteraan sosial, kemiskinan dan kesenjangan gender telah tertangani. Namun kenyataan yang terjadi tidaklah demikian, walaupun kita dimasa lalu pernah menikmati pertumbuhan ekonomi yang begitu menakjubkan dan kesadaran tentang ketimpangan gender telah meningkat, ternyata kasus-kasus tentang kekerasan pada anak (*child abuse*) , tetap terjadi bahkan jumlahnya semakin meningkat.

Penelitian Tentang Trafficking terhadap Perempuan dan anak di Jawa Timur yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Hukum dan Gender (PPHG) Fakultas Hukum Brawijaya Malang Tahun 2002, mengkaji tentang khasanah hukum ketenagakerjaan di Indonesia, bahwa pembantu rumah tangga terutama perempuan dan anak tidak termasuk pekerja yang dilindungi hukum ketenaga kerjaan. Karenanya mereka dapat dengan mudah dikeluarkan dari tempat kerjaannya oleh majikan, manakala majikan sudah tidak menyukainya. Dilihat jam kerja, jenis pekerjaan, sistem dan jumlah upah yang diterima, kesempatan istirahat dsn pengembangan diri bagi PRT, dan ikatan kerjanya yang tidak jelas maka pekerjaan PRT termasuk dalam pekerjaan yang eksploitatif. Apalagi jika dilihat dari rentannya PRT terhadap tindak kekerasan termasuk kekerasan seksual, mengalami keterasingan dari lingkungan sekitar dan ketiadaan jaminan dan perlindungan hukum, maka jelaslah bahwa PRT termasuk dalam bentuk-bentuk perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak. melaporkan bahwa perdagangan orang, terutama perempuan dan anak sebagai PRT dan buruh juga terjadi di luar negeri,

Hasil dari tiga laporan penelitian yang difasilitasi oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan yaitu Penelitian di Jawa Barat, Jawa Timur dan Riau secara urnum melaporkan bahwa perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak melalui jalur pengiriman buruh migran merupakan bentuk perdagangan, tersebesar di Indonesia. Korban biasanya dibujuk, atau diberi informasi yang tidak cukup lengkap untuk ikut pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Pemerasan dan penipuan terjadi sejak awal proses prekruitan, kemudian oleh sponsor (calo, agen) korban diserahkan kepada pihak lain pengirim tenaga kerja (resmi ataupun tidak). Korban kemudian ditampung di suatu tempat. Ada berbagai bentuk tempat seperti penampungan, Balai Latihan Kerja (BLK) tempat pelatihan/penampungan sekaligus tempat penyekapan. Ditempat itu korban menunggu untuk diberangkatakan. Pemberangkatan korban menunggu adanya permintaan pihak luar negeri yang berniat "membeli" korban. Setelah ada permintaan dari agen/perorangan di luar negeri, korban dikirirnkan. Sejak sampai di negara lain tersebut, pihak pengirim di Indonesia sudah tidak bertanggung jawab atas keadaan korban.

Laporan dari Malaysia lebih dari 4.268 pekerja seks berasal dari Indonesia sebagai hasil kejahatan perdagangan perempuan dan anak. Di Malaysia terdapat 5 juta buruh migran yang 20% nya merupakan hasil perdagangan perempuan dan anak (Hasil Penelitian UNIBRAW tahun 2002). Di wilayah perbatasan negara Malaysia dan Singapura menunjukkan dari 6.800 orang yang terkait dalam kejahatan perdagangan perempuan di Malaysia sebagai pekerja seks, lebih dari 4.300 orang berasal dari Indonesia (Kompas 10 Mei 2001). Sedangkan dari hasil pemantauan dari sejumlah 5 juta buruh migran terdapat 20% merupakan hasil perdagangan perempuan dan anak yang berasal dari Indonesia. Laporan dari UNICEF 1998 memperkirakan sekitar 30% jumlah pelacur adalah anak-anak di bawah umur 18 tahun (± 21.000 anak). Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik, pada tahun 1998 tercatat 1,6 juta anak menjadi buruh, yang mempunyai resiko besar untuk dijadikan korban perdagangan orang. Hasil studi yang disampaikan oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) menunjukkan bahwa perdagangan orang yang dilakukan sebagian besar sindikat adalah untuk pekerja seksual termasuk paedophilia seksual (sodomi) yang terdapat hampir di semua kota besar terutama Jakarta dan Surabaya yang terakumulasi di puluhan lokasi, belum termasuk yang dilakukan melalui telepon atau internet.

Menurut Sriwahyuningsih dkk. dari (PPHG UNIBRAW, 2002, banyak cara dan modus operandi yang dilakukan oleh pelaku kekerasan dan kejahatan perdagangan orang terutama perempuan dan anak, antara lain, dengan cara penipuan atau Janji-Janji bohong sehingga korban tidak menyadari bahwa dirinya adalah obyek dari kejahatan perdagangan yang dilakukan oleh pelaku perorangan ataupun suatu jaringan yang luas dan terorganisasi baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Penelitian tersebut menitik beratkan pada perdagangan dalam bentuk eksploitasi seksual lintas Negara dari Indonesia ke Malaysia dan ke Jepang.

Sementara hasil penelitian trafficking di Riau oleh Universitas Padjadjaran Bandung melaporkan bahwa praktek perdadangan orang terutama perempuan dan anak, juga terjadi dalam wilayah Indonesia, migrasi bersifat lintas daerah dan atau lintas pulau. Sedangkan hasil penelitian trafficking di Jawa Barat oleh Universitas Padjadjaran Bandung melaporkan bahwa praktek perdadangan orang terutama perempuan dan anak, berada dalam wilayah daerah migrasi bersifat desa ke kota.

Hasil Penelitian JARAK tentang anak-anak yang bekerja di laut dan pantai sebagai pengumpul batu apung, di Desa Luk, Mataram, Lombok menunjukkan bahwa anak-anak, laki-laki dan perempuan, bekerja sangat keras dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore untuk menggali, mencuci, mengarungkan sampai dengan mengankut karung batu apung, dengan ongkos setiap karung Rp. 50 rupiah dan hasil rata-rata per hari Rp. 1.000 - 4.000. rata-rata mereka berusia 9-16 tahun. Tidak memiliki kesempatan untuk sekolah. Anak-anak, laki-laki dan perempuan, ada yang dijadikan pengemis, pengamen, penyemir sepatu atau pekerjaan jalanan lainnya urnumnya mengalami eksploitasi, mereka bekerja dalam waktu yang sangat lama, tidak punya kesempatan belajar dan bermain, dan berada dilingkungan yang membahayakan keselamatan jiwanya serta mempengaruhi pertumbuhan kejiwaannya. Mereka juga rentan terhadap kekerasan, yang dilakukan oleh orang dewasa (preman, aparat dan masyarakat urnumnya) maupun oleh orang tuanya sendiri, seperti pernukulan, di caci maki dan dihardik, disodomi ataupun diperkosa.

Hasil penelitian lrwanto dkk, menyatakan bahwa di Batam misalnya, anak-anak jalanan di datangkan oleh suatu kelompok yang mengangkut mereka dari Pariaman, Sumatra Barat. Mereka diambil dari keluarga miskin dan dijanjikan untuk disekolahkan. Sedangkan di Bali, anak-anak direkruit dari desa miskin di Karangasern dan Bangli, lalu diangkut ke Denpasar, Pantai Kuta, Gianyar dan Tuban. Kelompok kedua adalah mereka yang dipaksa oleh orang tuanya sendiri untuk bekerja di jalanan, diharuskan menyetorkan sejumlah uang kepada orang tuanya. Kasus di Makasar, misalnya dalam satu hari anak-anak ini menyetor kepada lbunya sebesar Rp. 20.000 -35.000. (kompas 20 Maret 2002). Kelompok ketiga adalah mereka yang lari dari rumah dan bekerja secara bebas untuk dirinya sendiri. Narnun anak-anak ini mengalami berbagai bentuk eksploitasi seperti dirampas uangnya oleh preman yang lebih dewasa, atau oleh petugas keamanan dan ketertiban (trantib)

Penelitian yang dilakukan oleh LBH APIK mengkaji tentang adopsi palsu yang pada urnumnya dilakukan oleh sindikat . Anggota sindikat mendatangi daerah-daerah miskin, daerah konflik, daerah penampungan atau daerah yang mengalami bencana. Mereka datang untuk mengadopsi bayi-bayi di bawah usia 1 tahun. Dengan janji agar bayi tersebut memperoleh pemeliharaan dan perawatan yang lebih baik. Namun kenyataannya bayi-bayi tersebut dijual ke pihak lain dengan harga yang cukup tinggi sehingga sindikat memperoleh keuntungan besar.

Beberapa contoh kasus adopsi palsu : Seorang Bayi di Solo diadopsi oleh sindikat untuk dijual ke luar negeri , Sebuah sindikat membeli bayi-bayi yang dilahirkan oleh anak jalanan/ perempuan miskin dan menyewakannya untuk mengemis , Sebanyak 20 bayi dari Poso, Sekangwatampohe, Sinjai, Masamba diadopsi oleh sindikat yang membangun "Panti asuhan bayi" dan membawanya ke Majene untuk dibesarkan dan dijadikan buruh perkebunan cokelat , sejumlah 5 bayi akan dijual ke Malaysia, tertangkap di Riau ketika transit , Seorang bayi di bawah 1 tahun di bawa dari Tanjung Balai dalam peti Es menuju Malaysia untuk di jual . Modus terbaru, Tiga perempuan hamil diajak ke Malaysia dengan janji mendapatkan pekerjaan dan upah tinggi. Sampai di Kota Kuching, mereka disekap bersama sekitar 10 perempuan hamil lainnya asal Indonesia. Setelah beberapa hari dilahirkan, bayi akan diambil oleh sindikat dan ibunya akan dijual sebagai PRT. Tiga perempuan tersebut berhasil lolos dan melarikan diri ke Pontianak, dan ditampung oleh LBH APIK Pontianak

Irwanto dkk(2002), membahas tentang sindikat perdagangan obat terlarang seringkali menggunakan perempuan dan anak-anak sebagai alat atau jalan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan : Proses produksi, Pemasaran/pengedaran, penyimpanan, penyelundupan atau pengantar Narkotika dan obat-obat terlarang. Beberapa cara yang dipergunakan menggunakan paksaan, ancaman kekerasan, kekerasan atau penipuan kepada anak-anak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang merupakan mata rantai perdagangan obat terlarang. Pola-pola yang dilakukan oleh sindikat selain dengan cara-cara tersebut di atas, juga menggunakan jebakan hutang dan atau ketergantungan obat, harapan keuntungan bagi kelompok miskin dan memasukkan korban ke prostitusi.

Di Bali kasus penggunaan anak-anak jalanan sebagai pengantar obat terlarang telah terungkap . Beberapa anak jalanan mengaku pernah disuruh mengantarkan bungkusan, narnun tidak diketahui isinya tersebut, dan diawasi secara ketat. Anak-anak jalanan merupakan kelompok paling rentan terhadap prakterk kejahatan ini. Peredaran obat terlarang juga terjadi di sebagian perempuan korban eksploitasi pelacuran. Kasus Perdagangan perempuan di Sabah misalnya, dalam lingkungan tersebut sekaligus menjadi arena perdagangan obat terlarang dan minuman keras.

Dari beberapa penelitian pendahuluan tersebut, peneliti berupaya mengadakan penelitian lanjutan dengan harapan lebih membuka nurani kita untuk lebih peduli dan perhatian terhadap persoalan perempuan dan anak yang terjadi di sekitar kita, sehingga perempuan dan anak dalam situasi khusus dapat segera mendapat perlindungan dan teratasi.

**BAB II**

**Landasan Teori**

1. **Budaya Patriarkhi Dan Bias Gender Sebagai Penyebab Kekerasan.**

Tinjauan Urnum tentang perempuan dan anak dalam situasi khusus kasusnya dari tahun ke tahun terjadi semakin meningkat, di dalam wilayah negara Republik Indonesia atau di luar wilayah negara. Dilihat dari kualitas modus operandinya, kejahatan ini semakin meningkat dan kompleks baik dalam bentuk-bentuknya maupun teknis operasionalnya, baik yang dilakukan secara perorangan, kelompok, maupun bersindikat. Demikian pula dari kuantitas pelakunya, pelaku perorangan maupun kelompok jumlahnya semakin meningkat. Sedangkan dari jumlah korbannya semakin meningkat secara drastis. Sebagai gambaran banyak anak perempuan Indonesia yang terperangkap di hotel-hotel di Tawau, Sabah, Malaysia, yang dipaksa untuk menjadi pekerja seksual komersial (PSK). Di Tawau saja ada 1000-an anak yang mengalami nasib seperti itu (Gatra, 12 Oktober 20002). Semakin meningkatnya kejahatan terhadap perempuan dan anak, terutama perempuan dan anak ini disebabkan oleh perkembangan unsur-unsur pola dan peta serta jaringan kejahatan tersebut

Indonesia sebagai salah satu negara peserta dari Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita" diwajibkan untuk melaksanakan Konvensi tersebut secara konsekuen. Konvensi yang telah diratifikasi tersebut mengikat Indonesia yang memerlukan perundang-undangan nasional (Kusumaatmadja, Mochtar; 1976 :16). Konvensi PBB tersebut diratifikasi dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1984 dan masuk dalam pengertian hukum, termasuk hukum internasional. Dalam hal ini Indonesia telah menjalankan azas hukum sebagai alat pembaharuan (Kusumaatmadja, Mochtar; 1976:10) Untuk hal tersebut hukum positif yang perlu dikernukakan adalah pasal 297 KUHP dimana pasal menyebutkan bahwa "Perdagangan perempuan dan perdagangan laki-laki yang belum cukup umur, dihukum penjara selama-lamanya 6 tahun. Politik hukum kita setelah pergantian kepemimpinan, dan perubahan kebijaksanaan ditandai dengan dikeluarkannya TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999 - 2004, merupakan kesepakatan rakyat melalui perwakilannya untuk melaksanakan program pembangunan nasional 5 tahun (Propenas). Hal tersebut merupakan akselerasi kebijakan negara sebagai personafikasi dari tata hukum nasional sebagai wujud empirik dari hukum positif (teori hukum murni dari Hans Kelsen, 1995: 2-3) Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Rl, dikeluarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004). Perubahan sosial yang terjadi dengan turunnya Presiden Soeharto tahun 1998 dan memulai proses demokrasi mewarnai semua segi-segi dan peri kehidupan bangsa, yaitu kedudukan hukum dari bangsa Indonesia. Seperti dikatakan Friedman: " A Crisis of society challenges the law more directly perhaps than any other branch of social activity" (Friedman, 1953:437).

Menurut asumsi umum yang menjadi salah satu penyebab terjadinya kondisi perempuan dan anak dalam situasi khusus adalah budaya patriarkhi yang masih sangat mendominasi kehidupan perempuan dan anak, dan menjadi sumber atas berbagai diskriminasi yang hingga kini masih terus terjadi pada perempuan. Kathleen Barry dalam bukunya *Sexual Slavery* (1979) sebagaimana yang dikutip oleh Gadis Arivia menyatakan bahwa penindasan terhadap perempuan seperti praktik perdagangan perempuan, pemaksaan prostitusi, turisme seks, penyunatan terhadap perempuan tidak hanya karena faktor eksploitasi ekonomi dan budaya, tetapi persoalan sebenarnya adalah karena adanya dominasi kekuasaan seksualitas laki-laki terhadap perempuan. Dominasi ini begitu kuat memenjara perempuan dalam ruang dimana perempuan terbisukan dan lumpuh.

Budaya patriarkhi juga mempengaruhi berbagai faktor dalam kehidupan manusia, khususnya perempuan. Bahkan perempuan yang secara biologis berbeda seks dengan laki-laki menjadikan alasan politik laki-laki dalam pembagian peran. Salah satu feminis *radikal-libertarian*, Kate Millet, dalam bukunya *Sexual Politics,* sebagaimana dikutip oleh Rosemary Putinam, (2006) memiliki argumen bahwa seks adalah politik yang didasarkan pada paradigma hubungan kekuasaan yang dilegitimasi oleh ideology patriarkhi. *Teori Ideology Patriarkhi* ini menurut Millet membesarkan perbedaan biologis laki-laki dan perempuan. Ideology ini memastikan bahwa laki-laki mempunyai peran yang maskulin dan dominan, sedangkan perempuan subordinat atau feminin.

.Tinjauan Sosiologis dalam kehidupan sehari-hari, laki-laki dan perempuan telah memperoleh pembagian peran, tugas dan nilai-nilai serta aturan-aturan yang berbeda. Perempuan karena fungsi reproduksinya, dia ditempatkan pada ruang domestic (rumah tangga) sedangkan laki-laki ditempatkan pada ruang publik. Pembagian peran, tugas dan nilai serta aturan-aturan diberikan melalui aturan social masyarakat, adat, hukum dan interpretasi agama yang keliru. Contoh yang paling sederhana adalah pembakuan peran dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: suami adalah Kepala keluarga dan isteri adalah Kepala Rumah Tangga (Pasal 31 ayat (3) ). Pembagian peran secara baku ini ternyata berdampak sangat luas, mempengaruhi pola pengasuhan dan kesempatan bagi anak laki-laki dan perempuan. Hampir di seluruh Indonesia, terutama di pedesaan, orang tua lebih memberikan kesempatan pendidikan bagi anak laki-laki, karena suatu hari anak laki- laki harus mencari nafkah bagi anak dan isterinya.

Sedangkan anak-anak perempuan dianggap tidak terlalu membutuhkan pendidikan karena suatu hari nanti akan mengikuti dan dipelihara oleh suaminya. Selanjutnya, orang tua memilih segera menikahkan anak-anak perempuannya dalam usia muda (bahkan dalam usia anak- anak) dengan beberapa alasan, antara lain untuk meringankan beban kemiskinan keluarga, kekhawatiran anak perempuannya kehilangan keperawanan, kekhawatiran anaknya tidak laku dan menjadi perawan tua. Data Susenas 1998 menyatakan bahwa perkawinan anak-anak (di bawah 16 tahun) cukup tinggi dan bahkan mencapai 16% di Jawa Barat. Pemahaman demikian mengakibatkan anak perempuan memperoleh peluang pendidikan lebih kecil dari anak laki-laki.

Masyarakat juga telah mengajarkan bahwa isteri yang baik adalah isteri yang menurut kepada Kepala Keluarganya. Dalam sebuah keluarga perempuan selalu diberikan pendidikan untuk rela berkorban untuk keluarga, sehingga banyak perempuan yang bekerja bukan untuk mengaktualisasikan dirinya atau melaksanakan haknya, narnun sekedar membantu suami untuk menambah penghasilan keluarga. Anak yang baik adatah anak yang menurut kepada keputusan orang tuanya. Banyak juga anak-anak yang terpaksa bekerja untuk membantu perekonomian keluarga atau kasihan kepada orang tuanya. Anak-anak perempuan yang kurang pendidikan terpaksa melakukan migrasi (perpindahan tempat) untuk dapat memperoleh pekerjaan.

Hal lain yang mengernuka di dalam masyarakat Indonesia, juga di dalam masyarakat dunia adalah posisi perempuan dan anak yang berada di bawah laki-laki. Bahkan dalam pengambilan keputusan pun mereka bukanlah subjek yang berhak untuk mengambil keputusan, tak terkecuali untuk hal-hal yang berkaitan dengan tubuh, seperti pengambilan keputusan dalam Keluarga Berencana dan pelayanan kesehatan. Sedangkan anak-anak tidak diberi hak untuk mengambil keputusan dalam hal pendidikan, usia kawin dan rencana masa depannya sendiri. Nilai lain yang diajarkan adalah kepatuhan dan menerima keadaan serta menjaga agar tidak terjadi suatu gejolak dalam suatu keluarga atau kelompok masyarakat. Kita tentu sering mendengar kata ini "dari pada ribut, ya lebih baik menerima saja" atau "dari pada jadi perkara, dan kita menjadi susah dibuatnya".

Ketimpangan gender dalam masyarakat cukup tinggi. Dalam studi yang dilakukan oleh Bappenas/Unicef dinyatakan bahwa kemauan politis untuk mengimplementasikan isu-isu yang berkaitan dengan gender masih sangat lemah. Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbagai bentuknya merupakan isu yang sangatmembutuhkan perhatian serius. Survey terhadap hubungan suami-isteri pada tahun 1997, yang dilakukan oleh Bappenas /Unicef menunjukkan bahwa 11% dari 339 responden laki-laki mengakui telah menyiksa isterinya dan 19 % mengakui telah melakukan intimidasi psikologis. 362 responden perempuan melaporkan bahwa mereka dipukul (16%), ditendang (9%), sisanya diludahi atau disundut rokok (Bappenas/Unicef, 2000 dari Indonesia Laporan Pembangunan Manusia 2001 BPS.BAPPENAS.UNDP).

Disamping itu, pandangan laki-laki yang hanya molihat perempuan sebagai obyek pemenuhan nafsu seksual laki-laki, yang masih berlangsung di seluruh dunia termasuk di Indonesia, semakin menempatkan perempuan dalam posisi yang sangat rentan terhadap eksploitasi seksual oleh laki-laki. Disamping itu, kampanye akan bahaya HIV/AIDS, dimaksudkan agar setiap orang menghindarkan dari seks tidak aman, ternyata berdampak serius bagi perempuan. Laki-laki lebih menyukai mencari anak-anak untuk pernuasan nafsu seksual, karena dianggap relative bersih dan lebih kecil terinfeksi penyakit tersebut. Bahkan laki-laki memilih berebut dan relamengeluarkan uang dengan jumlah yang sangat besar untuk mendapatkan pelayanan seksual dari anak-anak perempuan yang masih perawan. Kasus Leiang Perawan di Sabah Malaysia (Kompas, 16 Oktober 2002) mengungkapkan bahwa rata-rata para laki-laki hidung belang rela mengeluarkan uang tidak kurang dari 5.000 ringgit untuk memperoleh seorang anak perawan. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Kofifah Indar Parawansa menyatakan prihatin bahwa 4.300 dari 6.800 perempuan pekerja seks di Malaysia berasal dari Indonesia (63,2 %), urnumnya berusia sekitar 13-16 tahun (Kompas 10 Mei 2001) Lemahnya kedudukan dan rendahnya jumlah perempuan dalam struktur dan proses politik, ditingkat perumusan dan pengambilan keputusan kebijakan publik baik di eksekutif, legislative dan yudikatif di seluruh tingkat (dan pusat sampai ke desa) berakibat pada rendahnya akses (peluang), control (pengendalian), partisipasi(keikut sertaan dan benefit (manfaat) pembangunan yang dapat dinikmati oleh perempuan sejak proses perencanaan sampai dengan hasilnya (kertas kerja Tindakan khusus Sementara  : menjamin Keterwakilan perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia,2002)

Tatanan semacam inilah yang selama lebih dari puluhan bahkan ratusan tahun beriaku dalam masyarakat kita khususnya dalam masyarakat desa. Kita tidak pernah tahu dengan pasti, apakah tatanan nilai semacam ini merupakan nilai dasar yang tumbuh secara alami dalam masyarakat kita, ataukah represi kolonial yang telah tertanam yang kemudian berianjut dengan represi demi represi pada setiap pergantian pemerintah sesuai upaya, rezim demi rezim. Sehingga berbagai kebijakan yang berdampak pada dan membawa mereka ke dalam proses pemiskinan, atau ketidaktahuan yang terus berlangsung.

Kebijakan dan kondisi ekonomi di tingkat Internasional (Kebijakan ekonomi global) dan ekonomi nasional merupakan sebab penting terjadinya kemiskinan terhadap perempuan (feminisasi kemiskinan), yang pada gilirannya menempatkan perempuan sebagai komoditas dalam putaran kegiatan ekonomi. Sejak kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi menggariskan untuk lebih mengutamakan ekonomi berbasis Industri dari pada ekonomi berbasis agraris, struktur produksipun mengalami perubahan. Produksi pertanian terus berkurang, proses penyempitan lahan pertanian berjalan sangat cepat dan kebutuhan tenaga kerja di pedesaan semakin berkurang. Sementara di sisi lain, proses produksi di bidang industri terus meningkat seiring pembangunan berbagai pabrik di kota. Perkembangan ini menjadi faktor penagrik terjadinya migrasi penduduk dari pedesaan ke perkotaan.

Narnun kenyataan menunjukkan Kebutuhan tenaga di sector Industri terus bertambah tersebut sulit di isi oleh sebagian penduduk Indonesia dari pedesaan yang telah kehilangan lahan pekerjaannya di pedesaan.oleh- karena rendahnya pendidikan mereka. Pergeseran arah kebijakan ekonomi ini mengakibatkan ketimpangan dalam pendapatan. Laporan Pembangunan Indonesia 2001 menyatakan bahwa perubahan kebijakan ekonomi telah mengakibatkan pergeseran lokasi-lokasi perekonomian menuju pusat-pusat Industri. Hingga awal decade 1990-an, sebagian Industri modern Indonesia dan juga banyak infrastrukturnya berada di tiga daerah metropolitan Jawa, yaitu Jakarta, Bandung dan Surabaya. Jawa Barat dan Jawa Timur menghasilkan sekitar 60% dari total pendapatan nasional non migas. Seiring dengan proses pembangunan di perkotaan, proses pemiskinan di pedesaan terus berjalan karena penyempitan lahan produksi dan tingginya pengangguran, khususnya perempuan di pedesaan dan mendorong teriadinva migrasi dari pedesaan keperkotaan vana meniadi pusat-pusat ekonomi.

Kebijakan Internasional Globalisasi ekonomi, juga berarti globalisasi pasar kerja, membuka peluang adanya permintaan dan pemenuhan pasokan tenaga kerja dengan upah murah. Didukung oleh kemajuan teknologi transportasi, proses migrasi dan satu Negara ke Negara lain semakin pesat. Terutama sejak dibukanya kebijakan pengiriman tenaga kerja di ke luar negeri pada tahun 1980-an. Sebagaimana layaknya pasar, maka pasar kerja global memperternukan dua kepentingan, yaitu tingginya angka pencari kerja dengan sumber daya manusia yang rendah karena rendahnya tingkat pendidikan dan tingginya permintaan dari luar terhadap tenaga murah dan disektor domestic dan sector informal informal yang tidak membutuhkan tenaga terdidik. Hal ini mengakibatkan Booming pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dan antar kota/antar pulau di sector domestic, sebagai pembantu Rumah tangga (PRT) dan sector informal seperti perkebunan, tempat hiburan dan industri seks. Sementara kebijakan dibidang ketenaga kerjaan, keimigrasian dan kependudukan yang diharapkan dapat menjadi kontrol untuk melindungi pekerja migrant dan calon pekerja migrant temyata tidak dapat diharapkan. Lebih menyedihkan lagi, aparat di bidang-bidang tersebut banyak melakukan penyalahgunaan kewenangan dan mencari keuntungan pribadi. Berbagai pelanggaran seperti misalnya pemalsuan dokumen, dari mulai KTP, surat jalan sampai dengan passport banyak terjadi.

Kebijakan lain yang ikut memperngaruhi kondisi ekonomi masyarakat adalah ketergantungan Negara pada utang luar negeri yang kemudian mengakibatkan campur tangan lembaga-lembaga keungan internasional seperti IMF, Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB) sangat menentukan kebijakan ekonomi Indonesia yang menimbulkan berbagai kerugian bagi masyarakat. Tekanan mereka untuk melakukan penutupan 16 Bank di tahun 1998 dan desakkan untuk menghapuskan berbagai bentuk subsidi kebutuhan dasar masyarakat semakin mempercepat kemiskinan. Indonesia, hingga kini belum berhasil keluar dari situasi krisis ekonomi. Beban pembayaran hutang luar negeri dan dalam negeri mengakibatkan pengeluaran dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) lebih diutamakan untuk membayar hutang, daripada peningkatan penyediaan pelayanan publik.

Hampir seluruh proses, kebijakan, kondisi ekonomi dalam negeri dan luar negeri memiliki andil besar dalam proses pemiskinan masyarakat. Kondisi kemiskinan dan keterbelakangan dalam pendidikan, terutama pada perempuan dan anak-anak, diperparah oleh ketimpangan relasi gender antara laki-laki dan perempuan, pada gilirannya mengakibatkan perempuan dan anak-anak menjadi sasaran dan obyek dalam perdagangan orang, terutama perempuan dan anak.

1. **Anak -Anak Dalam Situasi Sulit.**

Anak memiliki posisi dan peran sosial penting sebagai bagian dari anggota masyarakat. Masalah anak yang berkembang di masyarakat masih dianggap menjadi tanggungjawab orang tua, karena anak tidak berdaya, lemah, dan polos. Anak hampir selalu menjadi pihak yang dirugikan. Namun. di lain pihak ada pandangan positif dari masyarakat yang menunjukkan bahwa anak adalah penerus keturunan yang dapat mengangkat status sosial dan ekonomi orang tua. Sehingga orang tua berusaha memenuhi kebutuhan anak. Walaupun anak semula dipandang sebagai beban ekonomi, tetapi karena keberhasilan anak akan mengangkat derajat orang tua, maka orang tua akan mengusahakan apa saja agar masa depan anak lebih baik dari mereka. Akibatnya ketergantungan anak terhadap orang tua tinggi yang mengakibatkan kemandirian anak berkurang.

Sedangkan pandangan negatif masyarakat menunjukan bahwa anak adalah seorang yang dapat dijadikan sarana mencari nafkah. Akibatnya anak dipaksa bekerja dan tidak dapat sekolah, menjadi anak jalanan, terlantar dan tidak dapat tumbuh wajar. Anak yang karena umumya secara fisik dan mental lemah polos, dan rentan sering ditempatkan pada posisi yang kalah dan hanya diperlukan sebagai obyek. Inisiatif, ide, keinginan dan kemauan anak sering tidak diakui, apa yang baik menurut orang tua adalah terbaik untuk anak akibatnya kreatifitasnya berkurang.Sebagian masyarakat memandang bahwa anak adalah aset ekonomi, banyak anak banyak rezeki. Pandangan ini ternyata telah mendorong sikap orang tua memberlakukan anak-anaknya sebagai aset ekonomi sehingga anak dipekerjakan untuk menambah penghasilan keluarga. Sesungguhnya masalah anak akan selesai jika masing-masing orang tua bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan anaknya.

Indonesia memiliki kompleksitas persoalan anak yang hingga saat ini belum terselesaikan secara menyeluruh dan komprehensif. Kita bisa melihatnya betapa banyaknya anak-anak yang mengalami gizi buruk, anak-anak yang hidup dengan HIV/AIDS, anak-anak cacat, anak-anak yang harus bekerja siang dan malam, anak-anak yang menjadi prostitusi dan objek pornographi, anak-anak yang hidup dalam penjara-penjara yang kumuh, kotor dan berdesak-desakan, dan sejumlah masalah anak lainnya yang dengan sangat mudah kita bisa jumpai.

Saat ini jumlah anak-anak yang berada dalam situasi sulit berdasarkan data dari Kementerian Sosial RI adalah sebanyak 17,7 Juta (Kompas, 23 Februari 2010). Anak-anak yang berada di dalam situasi sulit ini meliputi juga anak-anak yang telantar, anak-anak yang dieksploitasi dan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus termasuk anak cacat, anak-anak yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan, anak-anak yang berada di dalam panti asuhan dan juga anak-anak yang bekerja di sektor formal maupun informal. Dari jumlah anak-anak yang berada dalam situasi sulit ini kemampuan negara untuk mengatasinya hanya 4% setahun atau lebih kurang 708.000 anak, ini artinya negara baru mampu menyelesaikan masalah anak anak yang berada dalam situasi sulit ini selama 25 tahun atau seperampat abad ke depan.

Jumlah anak-anak yang berada dalam situasi sulit ini belum termasuk anak-anak yang suku terasing, anak-anak yang menderita HIV/AIDS, anak-anak yang terdiskriminasi karena berbagai alasan seperti suku, agama dan ras. Karena itu upaya dan langkah masih sangat panjang untuk bisa mengatasi masalah anak ini. Berbagai bukti empiris menunjukan bahwa masih dijumpai keadaan dari kelompok rentan yang belum sesuai dengan kondisi yang diharapkan.

Laporan Unicef tahun 1998 memperkirakan jumlah anak yang tereksploitasi seksual yang dilacurkan mencapai 40.000- 70.000 anak yang tersebar di 75.106 tempat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk anak jalanan didalamnya.Bukan hanya di dalam negeri. Di luar negeri, seperti Malaysia, seperti ditegaskan Khofifah ketika menjabat Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, 62,5 persen pekerja seks komersial (PSK) adalah orang Indonesia. Yang lebih memilukan 80 persen di antara PSK itu anak-anak. Pasal 63-66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara khusus menyatakan, anak-anak berhak dilindungi dari berbagai sebab, baik eksploitasi ekonomi, eksploitasi dan penyalahgunaan secara seks, penculikan, perdagangan, obat-obatan, dan penggunaan narkoba, dilindungi selama proses hukum.

Perlakuan salah terhadap anak secara umum memiliki pengertian sebagai penelantaran anak adalah tidak menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal maupun tidak memberikan kasih sayang yang cukup bagi seorang anak. Seorang anak dikatakan terlantar bukan karena ia sudah tidak memiliki salah satu orangtua atau keduanya. Anak terlantar adalah anak-anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial. Terlantar disini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh-kembang secara wajar, hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidak mengertian orangtua, karena ketidak mampuan, atau karena kesengajaan (Lati Gumilang, 2008).

Menurut Indra Sugiarno Kekerasan pada anak atau perlakuan salah pada anak adalah suatu tindakan semena-mena yang dilakukan oleh seseorang seharusnya menjaga dan melindungi anak (caretaker) pada seorang anak baik secara fisik, seksual, maupun emosi. Pelaku kekerasan di sini karena bertindak sebagai caretaker, maka mereka umumnya merupakan orang terdekat di sekitar anak. Ibu dan bapak kandung, ibu dan bapak tiri, kakek, nenek, paman, supir pribadi,guru, tukang ojek pengantar ke sekolah, tukang kebon, dan seterusnya. Jenis–jenis perlakuan salah dan penelantaran. Berbagai macam bentuk perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak telah ditemukan sepanjang dilakukannya mapping ini, antara lain:

• Pembiaran anak-anak terjebak dalam situasi yang dapat merusak perilaku dan moral anak (narkoba,pornografidanpornoaksi).

• Menitipkan anak dipanti asuhan dalam waktu yang panjang meski keluarga anak masih ada, “melepas beban tanggung jawab penuhan hak dasar anak”.

• Bayi yang dibuang.

• Pernikahan di Usia Dini dan juga pemaksaan pernikahan pada anak usia muda dibawah 18 tahun.

• Diskriminasi hak anak laki-laki dan perempuan baik dalam masalah sosial, pendidikan dan hak sipil/politik.

• Menjatuhkan sanksi yang berkelanjutan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual (pengusiran, nikah paksa di usia anak, menutup hak anak atas pendidikan)

Permasalahan sosial anak yang demikian seharusnya menjadi cambuk bagi pemerintah dan segenap elemen masyarakat yang sadar akan pentingnya hak anak untuk segera bersikap dan melakukan tindaka nyata. Upaya perlindungan guna mencapai pemenuhan hak kelompok rentan telah banyak dilakukan Pemerintah bersama masyarakat, namun masih dihadapkan pada beberapa kendala yang antara lain berupa: kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah, belum terlaksananya sosialisasi dengan baik, dan kemiskinan yang masih dialami masyarakat.

Bangsa Indonesia sudah selayaknya memberikan perhatian terhadap perlindungan anak karena amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28b ayat 2 menyatakan bahwa 'Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi'. Disisi lain, perlindungan terhadap keberadaan anak ditegaskan secara eksplisit dalam 15 pasal yang mengatur hak-hak anak sesuai Pasal 52 - Pasal 66 UU No.39 tahun 1999 tentang HAM. Dalam hubungan ini, Pemerintah melalui Keppres No.88 tahun 2000 telah menetapkan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Trafiking Perempuan dan Anak serta menetapkan Gugusan Tugas untuk memerangi dan menghapus kejahatan trafiking. Bidang garapan yang diimplementasikan mencakup perlindungan dengan mewujudkan norma hukum terhadap pelaku traflking, rehabilitasi din reintegrasi sosial bagi korban trafiking serta kerja sama dan koordinasi dalam penanggulangan trafiking.

Produk hukum yang paling menonjol dalam upaya perlindungan terhadap anak yang belum tersosialisasi dengan baik adalah adanya 5 (lima) UU yang mengatur tentang anak, yaitu : (a) UU No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak; (b) UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak; (c) UU No.20 tahun 1999 tentang pengesahan Konvensi ILO No.138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja; (d) UU No.1 tahun 2000 tentang pengesahan Konvensi ILO No.182 mengenai Pelarangan dan Tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak; dan (e) UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; disamping Undang-undang tersebut terdapat Keputusan Presiden No.36 tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak tahun 1986. Dari kelima UU tersebut secara umum dapat dikatakan, bahwa secara kuantitatif sudah cukup banyak Peraturan perundangan yang memberikan Perlindungan kepada anak yang sejalan dengan UU No.39 tahun 1999 tentang HAM. Secara kuantitatif keberadaan Undang-undang yang memberikan Perlindungan kepada anak sudah cukup banyak, seperti perlindungan hukum pada anak-anak yang masih mengalami diskriminasi hukum dan sosial, serta meratifikasi dua optional protocol Konvensi Hak Anak.

Walaupun telah banyak peraturan dan ratifikasi Undang-Undang tentang perlindungan anak, tetapi dalam implementasi Peraturan Perundang-undangan tersebut belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan antara lain: (a) Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang didasarkan pada UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak masih belum terwujud; (b) Upaya penegakan hukum (Law Enforcement) masih mengalami kesulitan; (c) Harmonisasi berbagai UU yang memberikan perlindungan kepada anak dihadapkan pada berbagai hambatan; dan (d) Sosialisasi Peraturan perundang-undangan kepada masyarakat belum sepenuhnya dapat dilakukan dengan baik.

Karena itu, harus ada komitmen yang sungguh-sungguh untuk mereduksi persoalan anak tersebut, komitmen saja belum cukup tetapi juga dibarengi dengan implementasi dari komitment. Karena itu beberapa rekomendasi penting untuk dipertimbangkan dalam upaya memberikan perlindungan anak yang menyeluruh di Indonesia termasuk membangun sistem dan mekanisme perlindungan anak yang harus bekerja secara rapi dan transparan di masyarakat yang didukung dengan sistem kesejahteraan sosial dan kesehatan dan penegakan hukum. Di samping itu perlu, juga memprioritaskan beberapa agenda khusus terhadap anak-anak yang berada dalam situasi khusus yaitu mereka yang karena kondisi sosial, budaya dan ekonomi menjadi korban perlakuan salah sehingga memerlukan perlindungan khusus. Berbagai bentuk perlakuan salah diantaranya menyebabkan mereka menjadi : 1) Tidak memiliki akta kelahiran; 2) Korban eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual; 3) Korban kekerasan; 4) Korban trafiking; 5) Terlibat dalam konflik hukum; 6) Mengalami kehamilan tidak dikehendaki; 7) Beresiko terhadap HIV & AIDS;.8) Penyandang cacat; 9) Tidak mempunyai wali/terlantar/yatim piatu (LPA, 2010).

1. **Kelompok Perempuan Rentan**

Masalah kekerasan terhadap kemanusiaan, khususnya perempuan menyita perhatian dan kepedulian banyak pihak. Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran HAM dan dibanyak negara dikategorikan sebagai kejahatan dan untuk mencegahnya dapat dilakukan oleh para petugas penegak hukum. Padahal berbagai kebijakan yang mengatur tindak kekerasan tidak sedikit produk-produk hukum yang telah dikeluarkan. Persoalan utama yang berkaitan dengan kekerasan adalah tidak adanya hukum yang secara khusus memberikan perlindungan bagi perempuan yang mengalami dan menjadi korban tindak kekerasan seperti KDRT, Pelecehan seksual, Kekerasan di ruang publik dan sebagainya.

Memang setiap kekerasan dapat dijaring dengan pasal-pasal kejahatan tapi terbatas pada tindak pidana umum. Oleh karena itu perlu pengaturan atau hukum yang secara khusus untuk memberikan hak yang secara khusus untuk memberikan perlindungan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dalam arti merumuskan tindak pidana sebagai kejahatan sampai dengan upaya hukum bagi para korban dan saksi. Dalam hal ini tidak hanya pengaturan dalam pemberian sanksi kepada para pelaku, tapi juga mengatur tentang proses tuntutan hukum serta kompensasi, pemulihan dan pengamanan diri korban (Kalibonso Rita Serena : 2000:99).

Masalah utama dalam pembangunan pemberdayaan perempuan adalah rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2004 menunjukkan bahwa penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah jumlahnya dua kali lipat penduduk laki-laki (10,90 persen berbanding 4,92 persen). Penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas yang buta aksara 11,71 persen, sedangkan penduduk laki-laki yang buta aksara 5,34 persen. Penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas yang buta aksara di daerah perdesaan jauh lebih besar daripada perkotaan (15,42 persen berbanding 6,99 persen). Angka partisipasi sekolah (APS) perempuan usia 7–12 tahun, 13–15 tahun, dan 16–18 tahun di daerah perdesaan lebih rendah daripada perkotaan. Selanjutnya, angka kematian ibu melahirkan masih tertinggi di ASEAN, yaitu 307 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI tahun 2002–2003). Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2004, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan masih relatif rendah, yaitu 49,23 persen, jika dibandingkan dengan laki-laki, yaitu 86,03 persen. Di bidang politik, data Komisi Pemilihan Umum (KPU) tahun 2004 menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih rendah. Keterwakilan perempuan di DPR RI sekitar 11,6 persen dan di DPD sekitar 19,8 persen. Keterlibatan perempuan dalam jabatan publik, yang dapat dilihat dari persentase perempuan pegawai negeri sipil (PNS) yang menjabat sebagai Eselon I, II, dan III juga masih rendah, yaitu 12 persen (data BKN tahun 2003). Sementara itu, peran perempuan pada lembaga judikatif juga masih rendah, masing-masing sebesar 20 persen sebagai hakim, dan 18 persen sebagai hakim agung pada tahun 2004.

Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun banyak upaya telah dilakukan oleh pemerintah, antara lain penyusunan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (RAN-PKTP), pembangunan pusat-pusat krisis terpadu di rumah sakit, pembangunan ruang pelayanan khusus (RPK) di Polda, Polres, dan di pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) di daerah, serta penyebaran informasi dan kampanye antikekerasan terhadap perempuan dan anak, semua upaya tersebut belum cukup untuk menekan tingginya tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan. Data yang akurat belum tersedia karena banyak kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan yang tidak dilaporkan, dengan anggapan bahwa masalah tersebut adalah masalah domestik keluarga yang tidak perlu diketahui orang lain. Data Pusat Krisis Terpadu (PKT) RS Cipto Mangunkusumo yang didirikan pada tahun 2000 menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan terus meningkat dari 226 kasus pada tahun 2000 menjadi 655 kasus pada tahun 2003. Dari jumlah kasus tersebut, hampir 50 persen adalah korban kekerasan seksual, sekitar 47 persen korban adalah anak-anak perempuan (di bawah usia 18 tahun), dan sekitar 74 persen korban berpendidikan SD hingga SLTA.

Berdasarkan laporan *Human Development Report* Indonesia 2004, angka *Human Development Index* (HDI) Indonesia 65,8, angka *Gender-related Development Index* (GDI) 59,2, dan angka *Gender Empowerment Measurement* (GEM) 54,6. Tingginya angka HDI, jika dibandingkan dengan angka GDI, menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan sumber daya manusia secara keseluruhan belum sepenuhnya diikuti dengan keberhasilan pembangunan gender, atau masih terdapat kesenjangan gender, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Sementara itu, rendahnya angka GEM menunjukkan bahwa partisipasi dan kesempatan perempuan masih rendah di bidang politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan.

Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini masih banyak yang bias gender dan/atau diskriminatif terhadap perempuan. Perangkat hukum pidana yang ada belum cukup lengkap dalam melindungi setiap individu, terutama dari tindak kekerasan dalam rumah tangga. Di samping itu, peraturan perundang-undangan yang ada juga belum dilaksanakan secara konsekuen untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan dan anak, termasuk memberikan pelindungan bagi perempuan dan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.

Sejalan dengan penguatan desentralisasi, timbul masalah kelembagaan dan jaringan di daerah (provinsi dan kabupaten/ kota) yang menangani masalah-masalah pemberdayaan perempuan dan anak. Program-program pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak merupakan program lintas bidang sehingga diperlukan koordinasi di tingkat nasional dan daerah, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi, termasuk dalam pemenuhan komitmen internasional, seperti *Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations against Women (CEDAW)*, *Beijing Platform for Action (BPFA), Convention on the Rights of the Child (CRC), World Fit for Children (WFC*), dan *Millennium Development Goals (MDGs)*. Masalah lain adalah masih terbatasnya data pembangunan yang terpilah menurut jenis kelamin sehingga sulit menemukenali masalah-masalah gender yang ada. Selain itu, partisipasi masyarakat belum maksimal dalam meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan kesejahteraan dan pelindungan perempuan .

Menyadari bahwa Indonesia merupakan bagian dari masyarakat Internasional yang terikat komitmen Internasional, maka kekerasan dalam bentuk apapun terhadap perempuan harus dihentikan agar terciptanya rasa aman, damai, adil dan sejahtera dengan memegang prinsip-prinsip keadilan yang mengedepankan dan menjunjung HAM. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka Indonesia dapat diasingkan dalam tata pergaulan mereka. Indonesia sebagai negara yang sudah menandatangani CEDAW (Convention on Elimination of all Forum of Discrimination Against Women), yaitu Konvensi PBB tentang penghapusan terhadap semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan, pada tanggal 24 Juli 1984, pemerintah Indonesia terikat dan tunduk pada konvensi tersebut. Dengan demikian konvensi tersebut telah menjadi instrumen hukum nasional yang sah dan mengikat sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang dikenal dengan Konvensi Perempuan.

Lebih jauh lagi, dalam Pasal 5 Konvensi Perempuan tersebut dinyatakan bahwa adanya jaminan persamaan tingkah laku, baik sosial dan budaya, antara laki-Iaki dan perempuan untuk mencapai penghapusan prasangka, kebiasaan dan segala praktek-praktek yang menimbulkan penindasan salah satu jenis kelamin. Disamping itu, Pasal 15 juga menyatakan bahwa negara juga menjamin dan mewajibkan persamaan laki-Iaki dan perempuan dihadapan hukum.

Sedangkan untuk bidang kesehatan reproduksi, Pasal 12 menetapkan bahwa negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita di bidang pemeliharaan kesehatan, dan supaya menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan termasuk pelayanan yang berhubungan dengan keluarga berencana, atas dasar persamaan antara pria dan wanita.

Dalam kerangka kebijakan nasional yang berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap perempuan, perlu didasari oleh Zero Tolerance Policy artinya tidak ada tindak kekerasan pada apapun yang dapat diterima. Hal ini berarti bahwa kebijakan sosial (Social Policy) dan kebijakan penegakan hukum (Law Enforcement Policy) yang menghormati dan melindungi harkat, martabat dan kodrat perempuan adalah sarana guna memerangi tindak kekerasan terhadap perempuan.

1. **Penyandang Cacat**

Salah satu masalah sosial yang dihadapi bangsa Indonesia pada saat ini antara lain adalah masalah penyandang cacat. Penyandang cacat juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, diantaranya adalah berhak memperoleh pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan yang ada pada mereka. Perhatian masyarakat akan keterbatasan yang dimiliki Penyandang cacat masih sangat kurang, bahkan seringkali diabaikan dan dianggap sebagai beban.

Tidak jarang ketersediaan lapangan pekerjaan yang layak sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki menjadi masalah tersendiri yang perlu mendapat perhatian. Penyandang cacat diharapkan mampu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan fisik, mental dan sosialnya sehingga diharapkan yang bersangkutan mampu bekerja sesuai dengan tingkat kemampuan, pendidikan dan keterampilan yang dimiliki serta sesuai dengan minat dan pengalamannya, sehingga mencapai kemandirian ditengah kehidupan masyarakat. Kendati perlu dipertimbangkan jenis pekerjaan yang sesuai jenis dan tingkat kecacatan mereka, sebagai tenaga kerja bukan cacat (normal), dan pekerjaan tersebut benar-benar dapat dijadikan sumber mata pencaharian yang layak dalam masyarakat.

Pasal 14 UU No.4 tahun 1997 jo Pasal 28 - Pasal 31 PP No.43 tahun 1998 tentang "Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat" mewajibkan bahwa setiap pengusaha yang memiliki jumlah karyawan 100 orang atau lebih pada perusahaannya wajib mempekerjakan minimal satu orang penyandang cacat untuk memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan, atau kurang dari 100 orang jika perusahaan tersebut menggunakan teknologi tinggi. Hasil penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan HAM di Medan dan Surabaya tahun 2002 menunjukkan, bahwa kuota tenaga kerja bagi penyandang cacat yang diwajibkan oleh UU tersebut di atas belum dipatuhi oleh perusahaan. Padahal UU No.4 Tahun 1997 memiliki daya paksa untuk dijatuhkannya sanksi pidana bagi pengusaha atau perusahaan yang tidak mematuhinya. Oleh karena itu pihak Kepolisian dan Kejaksaan berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran UU tersebut karena termasuk tindak pidana.

Dengan demikian maka upaya pemberdayaan penyandang cacat melalui kebutuhan kuota tenaga kerja tersebut bisa efektif untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang cacat di Indonesia. Sedangkan kendala yang dihadapi para penyandang cacat adalah upaya Pemerintah Pusat maupun daerah belum mengalokasikan anggaran yang cukup untuk rehabilitasi pendidikan dan kesejahteraan sosial penyandang cacat. Aksebilitas fisik bangunan umum dan lingkungan bagi penyandang cacat belum dilaksanakan kendati telah ada peraturannya. Pada kenyataannya masih adanya keterbatasan jumlah gedung dan fasilitas umum (seperti mal, pasar, sarana penyeberangan jalan, kantor pemerintah, sekolah dan bank) yang menyediakan akses bagi penyandang cacat, meskipun telah diatur dalam PP No.43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Rendahnya implementasi disebabkan antara lain ketidaktahuan, enggan melaksanakan, tidak ada pengawasan baik dari pemerintah maupun masyarakat, serta tidak ada penegakan hukum. Dengan demikian penyandang cacat perlu memahami hak-haknya bukan berarti diistimewakan, tetapi juga jangan dimarginalkan.

**BAB III**

**Metode Penelitian**

1. **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2011 sampai November 2011 . Penelitian ini mengambil situs lokasi di Kabupaten Tulungagung, sebuah kabupaten di Propinsi Jawa Timur dengan kategori kota kecil yang pertumbuhan ekonominya cukup kondusif, karena Tulungagung termasuk kota pengirim (*sending area*) tenaga kerja Indonesia keluar negeri yang terbesar di Jawa Timur > 21.000 orang yang bekerja sebagai TKI di luar negeri dan tersebar hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Tulungagung. pada tahun 2010, {*sumber : Disnakertrans* 2010}., sehingga peredaran uang dari pengiriman uang para TKI cukup besar dan perkembangan bisnis juga cukup pesat.

Berawal dari kondisi tersebut menyebabkan tingkat konsumtif masyarakat Tulungagung cukup tinggi demikian pula dengan berbagai persoalan yang ditimbulkan sebagai dampak dari keberadaan TKI di Kabupaten Tulungagung juga dikenal sebagai penghasil batu marmer dan keramik **.** Dampak tersebut antara lain timbulnya berbagai persoalan terutama yang terkait dengan perempuan dan anak, seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak,Tidak terpenuhi hak sipilnya atau memiliki akta kelahiran; Korban eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual; Korban trafiking; Anak dan perempuan berhadapan dengan hukum; Mengalami kehamilan tidak dikehendaki; Beresiko terhadap HIV & AIDS; Penyandang cacat; Tidak mempunyai wali/terlantar/yatim piatu .

1. **Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan berupa hasil wawancara dengan beberapa informan seperti para stake holder baik dari pihak pemerintah, ormas maupun lembaga swadaya masyarakat yang memiliki konsen pada perempuan dan anak. Data sekunder yang digunakan berupa literatur yang berkaitan seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti ; peraturan daerah, keputusan bupati, keputusan gubernur, keputusan menteri, dan surat keputusan bersama menteri serta Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan perempuan dan anak serta data dari dinas intansi terkait, surat kabar baik lokal maupun nasional, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan tema.

1. **Teknik dan Metode Pengumpulan Data**

Tehnik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini dengan menggunakan metode :

***1. Quistionare*** yaitu menggunakan daftar pertanyaan agar mendapat informasi yang realistis dan faktual untuk digunakan sebagai bahan informasi.

***2. In-depth interview atau*** wawancara mendalam yaitu proses bertatap muka dengan informan untuk melengkapi jawaban dan memperoleh alasan yang valid dan dapat dipercaya. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perempuan dan anak dalam situasi khusus di Kabupaten Tulungagung serta faktor –faktor apa yang menyebabkan kondisi tersebut terjadi.

***3. Focus Group Discussion***  mengajak mereka untuk mendiskusikan dan memetakan persoalan dan kebutuhan mereka (*need assesment*) sehingga mereka juga turut mengkaji beberapa permasalahan yang mereka hadapi hingga ditemukan solusi jalan keluarnya.

***4. Participant Observation*** atau observasi terlibatpada keluarga korban dari perempuan dan anak dalam situasi khusus serta menganalisis dampak yang ditimbulkan dari kondisi tersebut untuk mendapat solusinya. Dari observasi ini melibatkan peneliti pada kegiatan apa saja yang mereka lakukan baik di dalam ruang lingkup rumah tangga maupun lingkungan masyarakatnya Dari kegiatan ini peneliti mendapat gambaran tentang bagaimana dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan mereka terlibat dalam situasi dan kondisi tersebut.

Sedang metode pengumpulan data menggunakan metode pemetaan, trianggulasi serta telaah dokumen untuk memperkuat data informan dari segi karakteristik seperti umur, pendidikan, agama, status sosial dan pekerjaan.

1. Pemetaan (*Mapping*) , yaitu dengan memetakan semua persoalan dan kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk mendapatkan solusi sebagai jalan keluar dari setiap persoalan yang dihadapi oleh perempuan dan anak dalam situasi khusus.
2. *Triangulasi*, yaitu dengan mengadakan pengecekan keabsahan data pada orang lain yang dapat dipercaya (*cross check*) .
3. Telaah Dokumen adalah mengkaji dokumen-dokumen yang terkait dengan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan ekonomi bagi TKI, baik yang berupa dokumen instansi maupun berupa literatur lainnya yang mendukung.

**D. Analisa Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif (*interactive model of analysis*) yang meliputi tiga tahapan, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing* (Miless & Huberman*,* dalam Heribertus Subroto, 1988).Ketiga komponen tersebut aktivitasnya berbentuk interaksi dengan proses siklus. Dalam bentuk ini peneliti tetap bergerak di antara ketiga komponen dengan komponen pengumpulan data, selama proses pengumpulan data berlangsung. Setelah pengumpulan data, kemudian bergerak di antara *data reduction* (redukti data), *data display* (penyajian data) dan *conclusion drawing* (kesimpulan) dengan menggunakan waktu yang tersisa.

Gambar 6. Model Analisis Interaktif, Miles, M.B. & Hubermen, A.M (1988).Dalam tahap reduksi data, peneliti melakukan proses seleksi, fokus, penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang ada dalam *fieldnote*. Peneliti mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

Di dalam penyajian data, peneliti menyajikan susunan sistematis dari data yang telah didapatkan. Dengan penyajian tersebut, peneliti memahami apa yang terjadi dan sesuatu hal yang mungkin dapat dilakukan dalam analisis. Lalu, data tersebut disajikan dalam bentuk matrik, gambar, atau skema, jaringan kerja keterkaitan dan tabel. Hal ini dimaksudkan agar mampu menganyam dan menyusun informasi secara sistematis dan logis sehingga mudah dilihat dan dipahami dalan bentuk yang utuh.

Analisa lain yang digunakan adalah analisis *deskriptif* dan analisis *kualitatif* yaitu bertujuan untuk mendiskripsikan kondisi sosial ekonomi, dampak dari kondisi perempuan dan anak dalam situasi khusus dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kondisi tersebut berikut langkah-langkah solutif dalam mengatasi persoalan tersebut di Kabupaten Tulungagung dengan menggunakan pendekatan induktif yaitu menganalisis pandangan informan berkenaan dengan persoalan perempuan dan anak dalam situasi khusus, berikut menurut mereka faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya kondisi tersebut. Sedangkan pendekatan deduktif adalah dengan melakukan kajian teoritis dari dokumen-dokumen yang diperoleh untuk melakukan justifikasi hasil temuan di lapangan. Perpaduan dari kedua pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan hasil penelitian ini.

**BAB IV**

**PEMBAHASAN DAN TEMUAN PENELITIAN**

**A. Gambaran Umum Situasi Kabupaten Tulungagung**

**A.1. Kondisi Geografis**

Tulungagung merupakan salahsatu kabupaten dari 38 kabupaten/kota di PropinsiJawa Timur yang terletak di bagian selatan. Kabupaten Tulungagung terletak pada posisi 111o 43’ sampai dengan 112o 07’ bujur timur dan 7 o 51’ sampai 8o18’ lintang selatan. Batas wilayah, di sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Kediri tepatnya dengan kecamatan Keras. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Blitar. Di sebelah selatan berbatasan dengan samudra Indonesia dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek. Luas wilayah Kabupaten Tulungagung yang mencapai 1.150,41 km2 .

Kabupaten Tulungagung terbagi menjadi tiga jenis dataran yaitu tinggi, sedang dan rendah. Dataran merupakan daerah dengan ketinggian dibawah 500m dari permukaan laut, daerah ini meliputi semua kecamatan tetapi tidak semua desa untuk Kecamatan Pagerwojo dan Sendang hanya empat Desa. Dataran sedang mempunyai ketinggian 500m sampai dengan 700m dari permukaan laut, daerah ini meliputi Kecamatan Pagerwojo sebanyak 6 Desa dan Kecamatan Sendang sebanyak 5 Desa. Sedangkan dataran tinggi merupakan daerah dengan ketinggian diatas 700m dari permukaan air laut yaitu Kecamatan Pagerwojo sebanyak 1 Desa dan Kecamatan Sendang sebanyak 2 Desa.

Potensi sumber daya alam yang dimiliki meliputi sungai, hutan, perkebunan dan penambangan. Jumlah sungai kurang lebih ada 27 buah yang digunakan untuk pengairan sawah, disamping mengandalkan hujan dan waduk Wonorejo. Fungsi hutan meliputi hutan lindung, hutan produksi dan hutan wisata, dengan luas hutan 25.293 Ha. Potensi tambang yang tersedia meliputi marmer, kapur dan pasir. Pertambangan marmer dan kapur berada di wilayah selatan Tulungagung, sedangkan penambangan pasir berada pada sepanjang sungai Brantas dan sungai- sungai yang merupakan hulu pegunungan. Penggunaan tanah liat untuk bahan produksi bata dan genteng

**A.2. Pemerintahan**

Sedangkan dalam pemerintahan dipimpin Bupati dibantu Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah. Dalam Sekretaris Daerah terdapat 3 staf ahli Bupati , 3 asisten dan 9 kepala bagian. Satuan Kerja Pemerintah Derah terdiri dari 10 Badan, 15 Dinas dan 4 Kantor. Sedangkan pembagian wilayah pemeritahan terdiri dari 19 kecamatan, 271 desa dan kelurahan, dan terdapat 713 dusun yang terbagi dalam 257 desa. Adapun sebaran wilayah pemerintahan mulai kecamatan, desa/kelurahan, dusun, RW dan RT adalah sebagai berikut sebagai berikut :

***Tabel 1.1. Pembagian Wilayah Pemerintahan***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kecamatan** | **Desa** | **Kelurahan** | **Dusun** | **RW** | **RT** |
| 1 | Besuki | 10 | - | 20 | 44 | 224 |
| 2 | Bandung | 18 | - | 43 | 95 | 320 |
| 3 | Pakel | 19 | - | 42 | 94 | 311 |
| 4 | Campurdarat |  9 | - | 28 | 74 | 332 |
| 5 | Tanggunggunung |  7 | - | 37 | 75 | 160 |
| 6 | Kalidawir | 17 | - | 54 | 125 | 413 |
| 7 | Pucang laban |  9 | - | 24 | 44 | 162 |
| 8 | Rejotangan | 16 | - | 40 | 148 | 500 |
| 9 | Ngunut |  18 | - | 36 | 148 | 459 |
| 10 | Sumbergempol | 17 | - | 44 | 126 | 384 |
| 11 | Boyolangu | 17 | - | 43 | 106 | 441 |
| 12 | Tulungagung | - |  14 | - | 89 | 299 |
| 13 | Kedungwaru | 19 | - | 47 | 122 | 471 |
| 14 | Ngantru | 13 | - | 43 | 112 | 342 |
| 15 | Karangrejo | 13 | - | 39 | 79 | 266 |
| 16 | Kauman | 13 | - | 33 | 89 | 323 |
| 17 | Gondang | 20 | - | 50 | 100 | 388 |
| 18 | Pagerwojo | 11 | - | 37 | 64 | 188 |
| 19 | Sendang | 11 | - | 53 | 96 | 256 |
| **Total** | **257** |  **14** | **13** |  **.830** |  **.239** |

 *Badan Pusat Statistik, 2010*

 **A.3. Kependudukan**

Jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung berdasarkan Kabupaten Tulungagung dalam Angka tahun 2007 adalah 1.020.217 jiwa dengan jumlah laki-laki 508.523 jiwa dan jumlah perempuan 511.694 jiwa.

***Tabel 1.2. Penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NNo | **Kecamatan** | **Laki-laki** | Perempuan | **Jumlah Penduduk** |
| 1 |  Besuki | 17.953 | 17.886 | 35.839 |
| 2 |  Bandung | 24.160 | 23.097 | 47.257 |
| 3 |  Pakel | 25.256 | 25.644 | 50.900 |
| 4 | Campurdarat | 27.249 | 26.745 | 53.994 |
| 5 | Tanggunggunung | 12.390 | 12.608 | 24.998 |
| 6 |  Kalidawir | 33.850 | 33.955 | 67.805 |
| 7 | Pucanglaban | 12.645 | 13.401 | 26.046 |
| 8 | Rejotangan | 36.785 | 36.832 | 73.617 |
| 9 |  Ngunut | 37.907 | 38.783 | 76.690 |
|  | Sumbergempol | 31.751 | 31.682 | 63.433 |
|  | Boyolangu | 37.102 | 36.584 | 73.686 |
|  | Tulungagung | 32.683 | 33.956 | 66.639 |
|  | Kedungwaru | 42.555 | 41.669 | 84.224 |
|  |  Ngantru | 27.185 | 26.746 | 53.931 |
|  | Karangrejo | 19.191 | 19.851 | 39.042 |
|  |  Kauman | 24.930 | 25.844 | 50.774 |
|  |  Gondang | 27.357 | 27.662 | 55.019 |
|  | Pagerwojo | 14.831 | 15.148 | 29.979 |
|  |  Sendang | 22.743 | 23.601 | 46.344 |
| Jumlah | **508.523** | **511.694** | **1.020.217** |

Badan Pusat Statistik, 2010

Sehingga secara prosentase penduduk laki-laki : 49,84 % dan prosentase penduduk perempuan: 50,15 %. Angka pertumbuhan penduduk 1,74 %.

Berdasarkan BPS tahun 2010 jumlah anak-anak (usia dibawah 18 tahun) di kabupaten Tulungagung sekitar 324.627 jiwa, merupakan 31,82 % dari jumlah penduduk. Sedangkan jumlah anak perempuan berkisar 155.357 jiwa secara prosentase sebesar 15,23 % dari penduduk.

***Tabel 1.3. Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Umur | **Laki-laki** | **Perempuan** | **Jumlah** |
| 0 – 4 | 45.116 | 41.008 | 86.124 |
| 5 – 9 | 41.657 | 37.805 | 79.462 |
| 10 – 14 | 44.228 | 40.369 | 84.597 |
| 15 – 19 | 51.106 | 48.233 | 99.339 |
| 20 – 24 | 39.266 | 44.099 | 83.365 |
| 25 – 29 | 41.271 | 44.979 | 86.250 |
| 30 – 34 | 39.985 | 42.688 | 82.673 |
| 35 – 39 | 38.772 | 40.348 | 79.120 |
| 40 – 44 | 35.001 | 34.570 | 69.571 |
| 45 – 49 | 31.301 | 29.617 | 60.918 |
| 50 – 54 | 23.836 | 23.181 | 47.017 |
| 55 – 59 | 21.438 | 20.555 | 41.993 |
| 60 – 64 | 19.208 | 20.875 | 40.083 |
| 65+ | 36.338 | 43.367 | 79.705 |
| **Jumlah** | **508.523** | **511.694** | **1.020.217** |

 Badan Pusat Statistik, 2010

**A.4. Ekonomi, Sosial dan Budaya**

Industri yang terbesar di Kabupaten Tulungagung adalah industri kecil dan rumah tangga dimana bidangnya yang terbesar berturut turut adalah industri makanan, minuman dan tembakau; industri tekstil, pakaian jadi dan kulit; industri bahan galian bukan logam kecuali minyak bumi dan batu bara; industri bahan dari logam, mesin dan peralatan; industri kayu, bambu, rotan dan perabot rumah tangga dan terakhir industri kertas dan barang-barang dari kertas, percetakan dan penerbitan.

Berdasarkan data kantor Departemen Agama komposisi pemeluk agama adalah Islam 98,13%; Kristen 1,21%; Katolik 0,44%, Budha 0,15% dan Hindu 0,07%. Jumlah jamaah haji tahun 2007 sebanyak 769 dan pada tahun 2008 sebanyak 714. Pengikut kegiatan santapan rohani meningkat 1,16 persen. Peningkatan lainnya juga nampak dari semakin banyaknya Taman Pendidikan Al-Qur’an.

Kegiatan budaya banyak yang bercampur dengan kegiatan keagamaan misalnya selamatan yang dilakukan mulai bayi didalam kandungan, kelahiran hingga hari-hari kematian yang mewarisi budaya Hindu namun acara doanya berdasar agama Islam. Kegotongroyongan nampak dengan budaya sumbangan (mbecek-jawa red) kepada pihak yang mempunyai hajat. Namun sejalan dengan budaya materialis kegiatan ini berbau persaingan bahkan mengorbankan kebutuhan pokok untuk menjaga prestise.

**B. KESEHATAN BAGI ANAK DAN PEREMPUAN**

Indeks Pembangunan Manusia, sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan adalah *derajat kesehatan dan lamanya umur dilihat dari angka harapan hidup.* Dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak maka negara mengakui hak anak untuk menikmati derajat kesehatan tertinggi yang dapat dicapai. Sedangkan derajat kesehatan tertinggi suatu bangsa dilihat dari perilaku sehat atau pola hidup sehat, lingkungan sehat dan akses layanan kesehatan. Pola hidup sehat diwujudkan dengan konsumsi gizi seimbang termasuk ASI bagi bayi, aktifitas harian yang sehat termasuk kebiasaan berolah raga, istirahat seimbang dan menghindari kebiasaan buruk seperti merokok, komsumsi zat aditif berbahaya seperti rokok dan narkoba serta seks bebas. Lingkungan sehat didukung dengan penyediaan air bersih, sistem sanitasi dan rumah tinggal yang sehat dan bebas dari resiko penyakit menular yang berkaitan kebersihan lingkungan. Layanan Kesehatan meliputi pertolongan persalinan, pengobatan, tindakan medis dan pendidikan kesehatan kepada masyarakat.

 Negara mengusahakan pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perempuan dengan mengambil beberapa langkah yang tepat dengan :

* Memperkecil angka kematian bayi, anak dan ibu melahirkan;
* Memastikan pengadaan bantuan medis dan perawatan kesehatan dasar yang diperlukan untuk semua anak;
* Memberantas penyakit dan kekurangan gizi melalui penerapan teknologi yang mudah diperoleh, pengadaan makanan bergizi yang memadai, air minum yang bersih dengan mempertimbangkan bahaya dan resiko pencemaran lingkungan;
* Perawatan kesehatan sebelum dan sesudah melahirkan bagi ibu-ibu;
* Memastikan semua golongan masyarakat termasuk anak-anak mendapatkan informasi, pendidikan dan dukungan terhadap kesehatan dan gizi anak, manfaat pemberian ASI, kesehatan dan penyehatan lingkungan dan pencegahan kecelakaan;
* Mengembangkan pendidikan dan pelayanan keluarga berencana.

Disamping itu negara juga harus mengambil langkah yang efektif untuk menghapus kebiasaan-kebiasaan tradisional yang merugikan kesehatan anak.

 Adapun strategi pemerintah Indonesia melalui Departemen Kesehatan RI dalam mengembangkan partisipasi publik dengan membangun masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat adalah :

* Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat;
* Meningkatkan akses layanan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas;
* Meningkatkan sistem surveilans, monitoring dan informasi kesehatan;
* Meningkatkan pembiayaan kesehatan.

**B.1. Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak**

Indikator terpenuhinya kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak dapat dilihat dari angka kunjungan ibu hamil dan balita ke Posyandu maupun layanan kesehatan bagi ibu dan anak lainnya. Selain itu juga dari prosentase atau angka berat badan lahir rendah akibat ibu kurang gizi saat hamil, gizi kurang dan buruk bagi bayi, anak dan perempuan. Dalam siklus kesehatan kondisi ibu hamil juga dipengaruhi oleh tingkat kesehatannya pada usia remaja sehingga kesehatan remaja putri perlu mendapatkan perhatian untuk membangun generasi berkualitas.

***Tabel 2.1. Jumlah Bayi dengan ASI Eksklusif***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kecamatan** | **Puskesmas** | **Jumlah Bayi** | **Bayi dengan ASI Eksklusif 2010** |
| **Jml** | **%** |
| 1 | Besuki | Besuki | 299 | 123 | 41,14 |
| Besole | 222 | 34 | 15,32 |
| 2 | Bandung | Bandung | 715 | 353 | 49,37 |
| 3 | Pakel | Pakel | 745 | 534 | 71,68 |
| 4 | Campurdarat | Campurdarat | 764 | 600 | 78,53 |
| 5 | Tanggunggunung | Tanggunggunung | 368 | 233 | 63,32 |
| 6 | Kalidawir | Kalidawir | 601 | 263 | 43,76 |
| Tunggangri | 425 | 298 | 70,12 |
| 7 | Pucanglaban | Pucanglaban | 352 | 85 | 24,15 |
| 8 | Rejotangan | Rejotangan | 297 | 286 | 57,55 |
| Banjarejo | 562 | 358 | 63,70 |
| 9 | Ngunut | Ngunut | 662 | 76 | 11,48 |
| Balesono | 428 | 276 | 64,49 |
| 10 | Sumbergempol | Sumbergempol | 406 | 296 | 58,50 |
| Bendilwungu | 433 | 350 | 80,83 |
| 11 | Boyolangu | Boyolangu | 521 | 208 | 39,92 |
| Beji | 542 | 358 | 66,05 |
| 12 | Tulungagung | Tulungagung | 546 | 234 | 42,86 |
| Sembung | 473 | 337 | 71,25 |
| 13 | Kedungwaru | Kedungwaru | 654 | 167 | 25,54 |
| Simo | 506 | 147 | 29,05 |
| 14 | Ngantru | Ngantru | 416 | 282 | 67,79 |
| Pucung | 330 | 151 | 45,76 |
| 15 | Karangrejo | Karangrejo | 588 | 400 | 68,03 |
| 16 | Kauman | Kauman | 766 | 124 | 16,19 |
| 17 | Gondang | Gondang | 835 | 415 | 49,70 |
| 18 | Pagerwojo | Pagerwojo | 451 | 111 | 24,61 |
| 19 | Sendang | Sendang | 651 | 399 | 61,29 |
| **Jumlah** | **14.858** | **7.498** | **50,46** |

*Dinas Kesehatan Tulungagung, 2010*

Data cakupan ASI yang hanya mencapai 50,46% hal ini terus menunjukkan penurunan dibanding tahun 2006 dimana cakupan ASI eksklusif masih berada pada angka 63,34%. Tahun 2008 cakupan sedikit naik sekitar 0,22 % (tertera pada tabel 2.5 BAB II bagian B). Data ini menunjukkan keprihatinan terhadap hak anak untuk memperoleh asupan gizi pertama yang terbaik sehingga perlu ada riset yang lebih mendalam untuk memunculkan rekomendasi aksi dalam meningkatkan cakupan ASI eksluisif.

 Faktor budaya sering nampak mempengaruhi sikap ibu yang belum mandiri dalam memberikan asupan gizi pada anak, bahkan pihak keluarga dengan budaya yang lama menerapkan pola makan pada bayi. Misalnya memaksa bayi yang baru lahir dengan campuran pisang dan nasi yang dihaluskan. Persoalan lainnya adanya sebagian masyarakat yang merasa mempunyai prestise lebih baik ketika mampu membeli susu formula bermerk. Sehingga pendidikan yang dimiliki ibu juga harus didukung sosialisasi kepada keluarga dan masyarakat terutama berkaitan dengan fenomena riil ini.

***Tabel 2.2. Status Gizi Balita dan Jumlah Kecamatan Rawan Gizi***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kecamatan** | **Puskesmas** | **2009** | **2010** |
| **Balita**  | **BGM** | **Gizi Buruk** | **Balita**  | **BGM** | **Gizi Buruk** |
| 1 | Besuki | Besuki | 1.554 | 13 | 5 | 2.737 | 15 | 11 |
| Besole | 1.151 | 5 | 0 | 2.148 | 24 | 9 |
| 2 | Bandung | Bandung | 3.717 | 23 | 0 | 2.609 | 53 | - |
| 3 | Pakel | Pakel | 3.875 | 49 | 0 | 2.718 | 99 | 1 |
| 4 | Campurdarat | Campurdarat | 3.972 | 17 | 1 | 3.300 | 64 | 6 |
| 5 | Tanggunggunung | Tanggunggunung | 1.912 | 53 | 7 | 2.541 | 52 | - |
| 6 | Kalidawir | Kalidawir | 3.117 | 77 | 1 | 1.993 | 75 | - |
| Tunggangri | 2.206 | 21 | 1 | 1.751 | 5 | - |
| 7 | Pucanglaban | Pucanglaban | 1.827 | 0 | 0 | 3.542 | 21 | 7 |
| 8 | Rejotangan | Rejotangan | 2.919 | 28 | 0 | 2.193 | 87 | 5 |
| Banjarejo | 2.579 | 47 | 5 | 2.852 | 122 | - |
| 9 | Ngunut | Ngunut | 3.441 | 27 | 0 | 2.074 | 64 | 4 |
| Balesono | 2.222 | 78 | 0 | 1.791 | 62 | 1 |
| 10 | Sumbergempol | Sumbergempol | 2.627 | 61 | 0 | 2.531 | 150 | - |
| Bendilwungu | 2.249 | 18 | 0 | 3.600 | 17 | - |
| 11 | Boyolangu | Boyolangu | 2.703 | 52 | 0 | 2.194 | 36 | 3 |
| Beji | 2.811 | 109 | 0 | 1.723 | 5 | - |
| 12 | Tulungagung | Tulungagung | 2.833 | 13 | 3 | 3.797 | 15 | - |
| Sembung | 2.455 | 15 | 0 | 3.423 | 55 | - |
| 13 | Kedungwaru | Kedungwaru | 3.398 | 107 | 0 | 3.216 | 32 | 1 |
| Simo | 2.628 | 92 | 0 | 1.385 | 90 | 2 |
| 14 | Ngantru | Ngantru | 2.158 | 91 | 0 | 1.221 | 9 | - |
| Pucung | 1.712 | 7 | 1 | 2.029 | 42 | - |
| 15 | Karangrejo | Karangrejo | 3.054 | 32 | 6 | 3.810 | 10 | - |
| 16 | Kauman | Kauman | 3.949 | 19 | 0 | 4.019 | 22 | - |
| 17 | Gondang | Gondang | 4.339 | 26 | 0 | 1.889 | 160 | 1 |
| 18 | Pagerwojo | Pagerwojo | 2.342 | 16 | 1 | 3.167 | 17 | - |
| 19 | Sendang | Sendang | 3.441 | 11 | 3 | 2.990 | 74 | 3 |
| **Jumlah** | **77.189** | **1.107** | **34** | **74.244** | **1.477** | **54** |

 *Dinas Kesehatan Tulungagung, 2010*

Beberapa faktor yang menyebabkan kehamilan beresiko tinggi diantaranya ibu yang mengalami kekurangan energi kronik (KEK), sering hamil dan melahirkan, usia ibu yang sudah lanjut dan beberapa penyakit bawaan yang mempersulit proses persalinan. Angka kematian ibu yang baru melahirkan tahun 2009 hingga Nopember 2010 banyak disebabkan oleh pendarahan 8 kasus, sesak nafas 2 kasus dan DIC (kelainan pembekuan darah).

Sedangkan Neonatus risti atau bayi baru lahir yang beresiko kematian dipicu oleh beberapa faktor dimana tahun 2010 hingga bulan Nopember ini terdapat 122 kematian bayi dengan perincian :

* BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) : 32
* ASPIKSIA (Sesak Nafas) : 36
* Infeksi : 3
* Cacat bawaan : 19
* Trauma lahir : 6
* Lain-lain : 22

***Tabel 2.3. Jumlah Ibu Hamil, Bumil Risti, Neonatal dan Neonatal Risti menurut Kecamatan dan Puskesmas***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kecamatan** | **Puskesmas** | **Jumlah Bumil** | **Jumlah Bumil Risti** | **Jumlah Neonatal** | **Neo natal Risti** |
| 1 | Besuki | Besuki | 329 | 48 | 299 | 26 |
| Besole | 244 | 19 | 222 | 1 |
| 2 | Bandung | Bandung | 787 | 116 | 715 | 22 |
| 3 | Pakel | Pakel | 820 | 123 | 745 | 20 |
| 4 | Campurdarat | Campurdarat | 841 | 121 | 764 | 55 |
| 5 | Tanggunggunung | Tanggunggunung | 405 | 65 | 368 | 22 |
| 6 | Kalidawir | Kalidawir | 660 | 47 | 601 | 20 |
| Tunggangri | 467 | 69 | 425 | 4 |
| 7 | Pucanglaban | Pucanglaban | 387 | 48 | 352 | - |
| 8 | Rejotangan | Rejotangan | 546 | 81 | 497 | 50 |
| Banjarejo | 619 | 137 | 562 | 29 |
| 9 | Ngunut | Ngunut | 728 | 139 | 662 | 30 |
| Balesono | 471 | 29 | 428 | 32 |
| 10 | Sumbergempol | Sumbergempol | 557 | 80 | 506 | 7 |
| Bendilwungu | 477 | 97 | 433 | 85 |
| 11 | Boyolangu | Boyolangu | 573 | 67 | 521 | 40 |
| Beji | 596 | 93 | 542 | 4 |
| 12 | Tulungagung | Tulungagung | 600 | 57 | 546 | 18 |
| Sembung | 520 | 51 | 473 | 7 |
| 13 | Kedungwaru | Kedungwaru | 719 | 108 | 654 | 28 |
| Simo | 557 | 84 | 506 | 26 |
| 14 | Ngantru | Ngantru | 457 | 88 | 416 | 20 |
| Pucung | 363 | 50 | 330 | 52 |
| 15 | Karangrejo | Karangrejo | 646 | 95 | 588 | 31 |
| 16 | Kauman | Kauman | 836 | 112 | 766 | 34 |
| 17 | Gondang | Gondang | 918 | 169 | 835 | 75 |
| 18 | Pagerwojo | Pagerwojo | 496 | 83 | 451 | 28 |
| 19 | Sendang | Sendang | 725 | 52 | 651 | 33 |
| **Jumlah**  | 16.344 | 2.328 | 14.858 | 789 |

 *Dinas Kesehatan Tulungagung, 2010*

 Keikutsertaan pasangan usia subur sebagai peserta KB dapat mendukung pengaturan kelahiran yang dapat mengurangi resiko ibu hamil dan bersalin. Namun beberapa hal yang harus diperhatikan bahwa masyarakat dan tenaga kesehatan harus memperhatikan KB yang cocok dengan situasi tubuh ibu dan ketentuan agama yang dianut.

***Tabel 2.4. Jumlah PUS, Peserta KB Baru dan KB Aktif menurut Kecamatan dan Puskesmas***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kecamatan** | **Puskesmas** | **Jumlah PUS** | **Peserta KB Baru** | **Peserta KB Aktif** |
| **Jumlah**  | **%** | **Jumlah**  | **%** |
| 1 | Besuki | Besuki | 5.933 | 731 | 12,32 | 2.773 | 46,74 |
| Besole | 5.143 | 195 | 3,79 | 2.363 | 45,95 |
| 2 | Bandung | Bandung | 6.285 | 672 | 10,69 | 6.641 | 105,66 |
| 3 | Pakel | Pakel | 6.546 | 815 | 12,45 | 8.385 | 128,09 |
| 4 | Campurdarat | Campurdarat | 7.836 | 542 | 6,92 | 7.743 | 98,81 |
| 5 | Tanggunggunung | Tanggunggunung | 6.059 | 520 | 8,58 | 4.756 | 78,49 |
| 6 | Kalidawir | Kalidawir | 4.695 | 1.058 | 22,53 | 6.057 | 129,01 |
| Tunggangri | 3.725 | 782 | 20,99 | 4.538 | 121,83 |
| 7 | Pucanglaban | Pucanglaban | 8.729 | 1.171 | 13,42 | 4.384 | 50,22 |
| 8 | Rejotangan | Rejotangan | 5.638 | 962 | 17,06 | 4.892 | 86,77 |
| Banjarejo | 7.304 | 1.111 | 15,21 | 5.666 | 77,57 |
| 9 | Ngunut | Ngunut | 6.451 | 1.135 | 17,59 | 6.053 | 93,83 |
| Balesono | 6.154 | 744 | 12,09 | 4.007 | 65,11 |
| 10 | Sumbergempol | Sumbergempol | 7.190 | 1.015 | 14,12 | 5.776 | 80,33 |
| Bendilwungu | 8.018 | 876 | 10,93 | 5.033 | 62,77 |
| 11 | Boyolangu | Boyolangu | 5.673 | 418 | 7,37 | 4.798 | 84,58 |
| Beji | 5.865 | 502 | 8,56 | 5.473 | 93,32 |
| 12 | Tulungagung | Tulungagung | 10.045 | 478 | 4,76 | 3.540 | 35,24 |
| Sembung | 10.099 | 215 | 2,13 | 3.338 | 33,05 |
| 13 | Kedungwaru | Kedungwaru | 8.969 | 687 | 7,66 | 6.125 | 68,29 |
| Simo | 4.003 | 185 | 4,62 | 5.072 | 126,70 |
| 14 | Ngantru | Ngantru | 2.966 | 658 | 22,18 | 3.310 | 111,60 |
| Pucung | 5.670 | 384 | 6,77 | 3.378 | 59,58 |
| 15 | Karangrejo | Karangrejo | 8.581 | 1.001 | 11,67 | 6.350 | 74,00 |
| 16 | Kauman | Kauman | 10.423 | 748 | 7,18 | 6.661 | 63,91 |
| 17 | Gondang | Gondang | 7.009 | 514 | 7,33 | 8.027 | 114,52 |
| 18 | Pagerwojo | Pagerwojo | 7.880 | 860 | 10,91 | 5.842 | 74,14 |
| 19 | Sendang | Sendang | 9.492 | 1.092 | 11,50 | 6.942 | 73,14 |
| **Jumlah** | **192.381** | **20.071** | **10,43** | **147.923** | **76,89** |

*Dinas Kesehatan Tulungagung, 2010*

1. **TEMUAN ANAK DAN PEREMPUAN DALAM SITUASI KHUSUS DI KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Tindak salah yang dialami anak-anak dapat memunculkan trauma fisik maupun psikologi yang menentukan kualitas hidupnya di masa depan. Anak yang menjadi korban kekerasan misalnya rawan menjadi pelaku atau mengalami tekanan kuat sehingga tidak mampu beraktifitas secara optimal. Anak dan Perempuan yang menjadi korban trafiking bahkan dapat kehilangan kehormatan, kerugian financial dan moral yang luar biasa. Upaya perlindungan anak dan perempuan menjamin agar mereka tidak menjadi penyandang masalah sosial. Anak dan perempuan dalam situasi khusus adalah mereka yang karena kondisi sosial, budaya dan ekonomi menjadi korban perlakuan salah sehingga memerlukan perlindungan khusus. Berbagai bentuk perlakuan salah diantaranya menyebabkan mereka menjadi :

* Tidak terpenuhi hak sipilnya atau memiliki akta kelahiran;
* Korban eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual;
* Korban kekerasan;
* Korban trafiking;
* Anak dan perempuan berhadapan dengan hukum;
* Mengalami kehamilan tidak dikehendaki;
* Beresiko terhadap HIV & AIDS;
* Penyandang cacat;
* Tidak mempunyai wali/terlantar/yatim piatu dll.

Langkah-langkah perlindungan anak dan perempuan untuk masalah diatas harus dipadukan melalui program-program pencegahan, identifikasi, pelaporan, rujukan serta pemeriksaan, perawatan dan tidak lanjut dari kejadian perlakuan salah terhadap anak-anak dan perempuan. Pada tahun 2009 telah disepakati beberapa alur rujukan penanganan korban untuk menjamin agar mereka mendapat rasa keadilan, direhabilitasi dan kembali dalam kehidupan sosial yang normal.

 **C.1. Anak Tanpa Akta Kelahiran**

Kementerian Dalam Negeri mentargetkan Akta Kelahiran 100% bagi semua anak pada Tahun 2010 Anak seharusnya didaftarkan segera setelah kelahirannya dan sejak lahir mempunyai hak atas nama, hak untuk memperoleh kebangsaan, mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya. Kebiasaan masyarakat yang sudah secara otomatis diurus apabila ada kelahiran dalam keluarga adalah surat kenal lahir dari desa, namun surat tersebut bukan akta kalahiran yang saat ini berlaku secara universal. Padahal akta kelahiran merupakan hak sipil bagi setiap anak, termasuk mereka yang tidak jelas status orang tuanya. Dengan sistem administrasi kependudukan, pencatatan kelahiran sangat penting, selain sebagai pengakuan yuridis negara atas keberadaan warganya jika menjadi data base yang dapat digunakan sebagai landasan analisis kebutuhan penduduk berbasis usia.

Dari survey yang dilakukan LPA terhadap lembaga pendidikan tahun 2010, kabupaten Tulungagung telah menunjukan capaian yang luar biasa. Adapun data anak-anak yang sudah mempunyai kutipan akta kelahiran komposisinya sebagai berikut :

Tabel 4.1 Data Anak Sekolah yang Memiliki Akta Kelahiran tahun 2010

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sekolah** | **Anak Seolah yang Memiliki Akta Lahir** | **Responden** | **Prosentase** |
| **L** | **P** | **L** | **P** | **L** | **P** |
| SD | 25.621 | 24.224 | 29.301 | 27.994 | 87,44 | 86,53 |
| SMP | 14.727 | 14.736 | 16.205 | 16.301 | 90,88 | 90,40 |
| SMA | 2.430 | 3.535 | 2.579 | 3.694 | 94,22 | 95,70 |
| SMK | 4.040 | 4.059 | 4.049 | 4.164 | 99,78 | 97,48 |

 *Data Primer LPA Tulungagung 2010*

Grafik 4.1 Perkembangan Kepemilikan Akta Kelahiran pada Anak Sekolah

*Data Primer LPA Tulungagung, 2010*

Tabel 4.2 Akta Kelahiran Umum Menurut Bulan Dan Kewarganegaraan

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Bulan** | **Indonesia** | **Indonesia Nasrani** | **WNI Keturunan** | **WNA** | **Anak Luar Nikah** | **Jumlah** |
| 1 | Januari | 2.360 | 13 | 7 | - | 26 | 2.406 |
| 2 | Pebruari | 2.237 | 5 | - | - | 22 | 2.264 |
| 3 | Maret | 1.192 | 10 | - | - | 19 | 1.221 |
| 4 | April | 1.569 | 16 | - | - | 36 | 1.621 |
| 5 | Mei | 1.518 | 15 | - | - | 26 | 1.559 |
| 6 | Juni | 1.613 | 10 | - | - | 26 | 1.649 |
| 7 | Juli | 1.677 | 11 | - | - | 26 | 1.714 |
| 8 | Agustus | 1.475 | 13 | - | - | 17 | 1.505 |
| 9 | September | 1.646 | 11 | - | - | 16 | 1.673 |
| 10 | Oktober | 999 | 15 | - | - | 26 | 1.040 |
| 11 | Nopember | 3.952 | 17 | - | - | 24 | 3.993 |
| 12 | Desember | 4.344 | 13 | - | - | 30 | 4.387 |
| **Jumlah** | 24.582 | 149 | 7 | 0 | 294 | 25.032 |

 *Dispenduk dan Capil, 2010*

Tabel 4.3 Data Akta Kelahiran Umum

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Bulan** | **Akta Kelahiran Umum 2009****(usia 1 – 60 hari)** | **Akta Kelahiran Umum 2010****(usia 1 – 60 hari)** |
| WNI | WNI | WNA | WNA |
| 1 | Januari | 690 | - | 808 | - |
| 2 | Pebruari | 656 | - | 748 | - |
| 3 | Maret | 605 | - | 729 | - |
| 4 | April | 548 | - | 1494 | - |
| 5 | Mei | 582 | - | 816 | - |
| 6 | Juni | 608 | - | - | - |
| 7 | Juli | 566 | - | - | - |
| 8 | Agustus | 518 | - | - | - |
| 9 | September | 2748 | - | - | - |
| 10 | Oktober | 1040 | - | - | - |
| 11 | Nopember | 904 | - | - | - |
| 12 | Desember | 791 | - | - | - |
| **Jumlah** | 10256 | - | 4595 | - |

 *Dispenduk dan Capil 2010*

**C.2. Eksploitasi terhadap Anak dan Perempuan**

Eksploitasi terhadap anak dan perempuan rawan terjadi pada situasi keluarga yang tidak berdaya. Pada awalnya merupakan tindakan darurat untuk memberikan dukungan ekonomi keluarga, namun biasanya berlanjut pada pemerasan. Eksploitasi merupakan bentuk pemerasan tenaga, seksual maupun ekonomi yang menyebabkan korban kehilangan kesempatan untuk memperoleh hak-haknya. Dampak dari eksploitasi menjadikan korban yang jelas adalah gangguan fisik termasuk kesehatan dan gangguan psikologis yang membuat mereka tertekan menjadi sangat tidak berdaya atau bahkan jiwa mereka memberontak tanpa kendali.

Pekerja Anak

Sebagian masyarakat berdalih apabila anak-anak bekerja merupakan bentuk latihan, namun banyak yang tidak menyadari disamping keterampilan kerja yang diperoleh mereka akan kehilangan dukungan tumbuh kembang apabila terjerat dalam lingkup kerja yang memilki aturan, target penyelesaian pekerjaan dan pengupahan. Pekerja anak merupakan merupakan korban eksploitasi ekonomi. Karena kegiatan bekerja mereka tidak dapat belajar secara optimal, bahkan sebagian dari mereka telah drop out dari sekolah. Mereka terpaksa bekerja karena himpitan keadaan misalnya kemiskinan, penelantaran orang tua, pengaruh lingkungan dan budaya. Dampak anak yang bekerja adalah hilangnya kesempatan memperoleh pendidikan, ancaman kecelakaan kerja, gangguan kesehatan, kerusakan moral akibat pengaruh teman kerja dewasa dan lainnya yang dapat dianalisa sesuai jenis pekerjaan anak.

BPTA (Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak) : harus dihapuskan. Selain memperhatikan batasan usia minimal bekerja adalah 15 tahun, anak-anak tidak boleh terlibat pada pekerjaan terburuk yaitu pekerjaan yang :

* Membahayakan kesehatan dan keselamatan
* yang berhubungan dengan perbuatan, perakitan/pemasangan, pengoperasian/ perbaikan mesin, pesawat, instalasi dan peralatan lainya.
* Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya secara fisik, kimia dan biologis.
* Praktik perbudakan
	+ Perdagangan anak
	+ Pekerja ijon (debt bondage)
	+ Kerja paksa
	+ Pelibatan anak dalam konflik
* Untuk kegiatan ilegal
	+ Pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, produksi/penjualan/pengedaran obat-obat terlarang
* Membahayakan moral anak
	+ Perusahaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bilyard, bioskop, panti pijat atau lokasi yang dapat dijadikan prostitusi
	+ Pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras, obat perangsang seksualitas dan/atau rokok.

Di dalam undang-undang ketenagakerjaan no.13 tahun 2003 diatur dalam pasal 68 dan 69, bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Anak usia 13-15 tahun dapat melakukan pekerjaan ringan yang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial dengan syarat sebagai berikut :

* Ijin tertulis dari orang tua atau wali
* Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali
* Waktu kerja maksimum 3 jam
* Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah
* Jaminan keselamatan dan kesehatan pekerja
* Adanya hubungan kerja yang jelas
* Dan menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (setara dengan orang dewasa).

 Pekerja Anak di Tulungagung sebagian masih bersekolah, hal ini terdeteksi melalui instrumen penggalian data melalui sekolah. Namun sebagian dari mereka telah DO bahkan menikah. Beberapa bentuk pekerjaan anak di Tulungagung dapat dikatakan bentuk pekerjaan terburuk dengan mempertimbangkan definisi diatas. Sehingga beberepa pola intervensi yang dilakukan diantaranya pembatasan jam kerja, penggunaan alat keselamatan kerja dan menjamin mereka tetap bersekolah. Disamping perusahaan kesadaran juga harus tumbuh dari keluarga, meskipun seringkali anak memutuskan bekerja karena pengaruh lingkungan. Berdasarkan pengamatan dalam program PPA-PKH tahun 2010 pengembalian anak-anak ke sekolah formal banyak menemui kesulitan yang bersumber dari diri pekerja anak. Untuk itu dampak mental ini merupakan hal yang tidak dapat disepelekan.

Tabel 4.4 Data Pekerja Anak yang Bersekolah

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sekolah** | **Pekerja Anak yang Bersekolah**  | **Responden** | **Prosentase** |
| **L** | **P** | **L** | **P** | **L** | **P** |
| SD | 353 | 311 | 29.301 | 27.994 | 1,20 | 1,11 |
| SMP | 237 | 75 | 16.205 | 16.301 | 1,46 | 0,46 |
| SMA | 703 | 411 | 2.579 | 3.694 | 27,26 | 11,13 |
| SMK | 92 | 24 | 4.049 | 4.164 | 2,27 | 0,58 |

 *Data Primer LPA Tulungagung,2010*

Berkut adalah grafik perkembangan pekerja anak yang bersekolah menurut tingkat pendidikan.

Grafik 4.1 Perkembangan Anak Sekolah Dasar (SD) yang menjadi Pekerja Anak

 *Data Primer LPA Tulungagung,2010*

Grafik 4.2 Perkembangan Anak Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang menjadi Pekerja Anak

 *Data Primer LPA Tulungagung 2010*

Grafik 4.3 Perkembangan Anak Sekolah Menengah Atas (SMA) yang menjadi Pekerja Anak

 *Data Primer LPA Tulungagung, 2010*

Grafik 4.4 Perkembangan Anak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang menjadi Pekerja Anak

 *Data Primer LPA Tulungagung,2010*

Tabel 4.5 Jenis Pekerjaan Anak di Tulungagung

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Pekerjaan Anak** | **Kegiatan Kerja Pekerja Anak** | **Risiko** | **Lokasi (Kecamatan)** |
| 1 | Pekerja di industri garmen | Menjahit, sepak, bordir, Packing,  | Pernafasan terganggu debu kain, posisi kerja | Kedungwaru, kauman, Tulungagung |
| 2 | Pekerja di industri rokok | Melinting rokok, packing | Pernafasan, posisi duduki terlalu lama | Merata di desa-desa sejak hancurnya pabrik rokok besar |
| 3 | Pekerja di industri makanan (emping, brondong dll) | Packing, produksi, memasak | Terpukul alat kerja, terkena letusan penggorengan | Ngantru, Boyolangu, Tulungagung, Ngunut |
| 4 | Pembuat bata dan genteng | Membuat luluh/adonan, mencetak, menjemur dan membakar | Beban kerja terlalu berat, terjemur di sinar matahari | Gondang, Boyolangu |
| 5 | Pande Besi | Menempa besi | Beban kerja terlalu berat, terpapar panas tinggi | Gondang |
| 6 | Industri marmer | Menjalankan mesin bubut, memoles | Pernafasan terganggu debu, rawan terkena mesin berputar | Campurdarat, Boyolangu, Besuki dan Bandung |
| 7 | Nelayan Anak | Menjala ikan di laut | Terkena angin laut, tidur di kelas, rawan tenggelam | Pucanglaban, Besuki dan Tanggunggunung |
| 8 | Kerajinan logam untuk peralatan rumah tangga | Pencetakan, finishing | Terpapar suhu tinggi | Ngunut |
| 9 | Tempat hiburan khusus  | Melayani tamu bahkan ada yang sampai plus-plus. | Kerusakan moral, putus sekolah, dieksploitasi sebagai daya tarik cafe | Cafe, warung cethe, di seluruh kabupaten dan pekerja kebanyakan dari luar Tulungagung |
| 10 | Pemelihara ternak | Mencari rumput, memandikan ternak | Waktu kerja panjang kehilangan kesempatan bermain | Merata terutama Pagerwojo, Sendang, Tanggung Gunung dan Pucanglaban |
| 11 | PRT dan Penjaga Toko Anak | Menjaga toko, menyelesaikan pekerjaan domestik | Gaji ditahan, diisolasi | Tulungagung, Ngunut, Bandung |
| 12 | Pemecah batu | Memecah batu dan menaikkan ke atas truk | Terlalu berat | Besuki, Kauman dan Karangrejo |

 LPA Tulungagung, 2010

**ESA dan PSK**

Seks dengan anak melanggar hukum dan dapat dikategorikan eksploitasi seksual, mengingat kesiapan organ reproduksi anak. Konvensi Hak Anak pasal 34 mengungkapkan bahwa hak anak atas perlindungan dari eksploitasi dan penganiayaan seksual termasuk prostitusi dan keterlibatan dari pornogragi. Eskploitasi Seksual terhadap Anak dapat terjadi akibat praktik trafiking dan hal serupa juga terjadi pada sebagian perempuan dewasa yang menjadi korban penipuan maupun bentuk kekerasan yang membuat mereka tidak mempunyai pilihan atau akibat perkawinan dini.

Dari temuan program penjangkauan kelompok remaja beresiko tinggi terhadap AIDS oleh LPA di 4 Kecamatan diperoleh estimasi jumlah anak yang dilacurkan sebanyak 126 anak termasuk anak yang masih bersekolah. Tidak semua PsK dan ESKA berada pada lokalisasi, mereka dapat dihimpun di suatu tempat rahasia, transaksi dilakukan melalui HP, di tempat hiburan khusus yang sekaligus menjadi tempat transaksi. Sebagian dari mereka berada di tempat-tempat mangkal prostitusi seperti pasar warung kopi remang Ngemplak, rumah tinggal yang tertutup dan sebagainya. Jumlah mereka yang terpantau adalah di lokalisasi Ngujang – Kedungwaru dan Kaliwungu - Ngunut.

Tabel 4.6 Wanita Tuna Susila Menurut Pendidikan dan Status Perkawinan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tingkat Pendidikan** | **Belum Pernah Kawin** | **Pernah Kawin** | **Jumlah** |
| 1 | SD | 35 | 150 | 185 |
| 2 | SMTP | 20 | 170 | 190 |
| 3 | SMTA | 25 | - | 25 |
| 4 | Akademi/Perguruan Tinggi | - | - | - |
| **Jumlah** | 80 | 320 | 400 |

 *Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung,2010*

**Anak dan perempuan Korban Trafiking**

 Berdasarkan definisi protokol PBB tahun 2000, Trafiking adalah kejahatan kemanusiaan dengan ***proses*** perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ***cara*** ancaman atau pengunaan kekersan, atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima pembayaran, memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk ***tujuan*** eksploitasi. Eksploitasi termasuk untuk melacurkan orang lain, atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh. Hak ini menguatkan pasal 35 dalam Konvensi Hak Anak berkaitan dengan perlindungan anak dari perdagangan orang.

 Definisi di atas tidak hanya untuk kasus trafiking pekerja seks saja, tetapi juga termasuk kerja paksa dan bentuk-bentuk eksploitasi lainya. Protokol PBB juga mengedepankan trafiking, melindungi dan mendampingi korban, dan untuk meghukum trafiker atau pelaku. Sebagain besar masyarakat belum paham betul kejadian yeng berkaitan dengan trafiking, sehingga ketika berdialog dengan mesyarakat di beberapa desa pengirim selalu mengatakan tidak ada korban. Tetapi ketika terjadi diskusi mendalam mereka mengungkapkan behwa hampir semua pekerja migran di kalangan mereka adalah korban trafiking.

 Bentuk-bentuk trafiking di Tulungagung bertujuan untuk prostitusi, eksploitasi seksual pekerja migran, pekerja anak terutama untuk pembantu rumah tangga dan praktek adopsi illegal. Praktek pembantu rumah tangga merangkap karyawan garmen dan pekerja anak banyak terjadi di industri garmen yang tertutup (sejenis penyekapan), mereka ditahan gajinya hingga 2 bulan bahkan ada yang harus setor uang jaminan, makanan yang disediakan sangat buruk. Modus lainnya dengan kedok biro penyaluran PRT yang kemudian setiap 2 minggu mereka (PRT anak-anak) diambil kembali untuk dipindahkan dengan alasan ayah sakit, atau ada keluarga meninggal. Trafiker mendapatkan jasa sebagai agen PRT minamal 2 kali dalam sebulan dari pengguna yang juga menjadi korban penipuan. Untuk pekerja migran selain berbagai bentuk penipuan, dilacurkan ada yang dijerat dengan praktek perkawinan, menurut informasi masyarakat hal ini terjadi untuk tujuan kerja negara Taiwan. Sedangkan kecenderungan yang baru disadar adalah adopsi ilegal dengan cara memalsukan keterangan kelahiran bayi yang langsung diakui sebagai orang tua kandung. Kasus terdata hanya berdasarkan temuan yang teridentifikai saja, padahal dengan tingginya kehamilan tidak dikehendaki semakin membuka peluang adopsi ilegal. Situasi yang menyebabkan Tulungagung rawan trafiking adalah :

* Tingginya pekerja migran terutama Pekerja migran tidak melalui jalur resmi.
* Maraknya tempat yang rawan prostitusi.
* Tingginya angka DO.
* Banyaknya Pengangguran.
* Jaringan pemesanan bayi dan kesadaran untuk tidak memalsukan orang tua bayi masih rendah.
* Kehamilan tidak dikehendaki dari pekerja tempat hiburan, istri yang ditinggal TKI dan remaja yang terlibat pergaulan bebas didukung keengganan masyarakat untuk melaporkan.

Berikut peta situasi pekerja migran di Tulungagung baik yang bekerja di luar negeri mapun luar kota di dalam negeri.

Tabel 4.7 Pekerja Migran

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No**  | **Kecamatan** | **Boro Kerja** | **TKI 2010** |
| **L** | **P** | **L** | **P** |
| 1 | Besuki | 559  | 148  | 724  | 601  |
| 2 | Bandung | 727  | 383  | 726  | 764  |
| 3 | Pakel | 712  | 381  | 557  | 925  |
| 4 | Campurdarat | 761  | 450  | 479  | 222  |
| 5 | Tanggunggunung | 272  | 264  | 507  | 228  |
| 6 | Kalidawir | 776  | 504  | 3.345  | 892  |
| 7 | Pucanglaban | 300  | 285  | 1.118  | 557  |
| 8 | Rejotangan | 794  | 511  | 3.020  | 1.571  |
| 9 | Ngunut | 753  | 626  | 2.163  | 1.138  |
| 10 | Sumbergempol | 562  | 366  | 1.819  | 520  |
| 11 | Boyolangu | 979  | 766  | 1.057  | 475  |
| 12 | Tulungagung | 612  | 365  | 156  | 173  |
| 13 | Kedungwaru | 553  | 415  | 416  | 283  |
| 14 | Ngantru | 765  | 478  | 565  | 592  |
| 15 | Karangrejo | 617  | 425  | 360  | 297  |
| 16 | Kauman | 921  | 585  | 144  | 153  |
| 17 | Gondang | 1.268  | 420  | 768  | 396  |
| 18 | Pagerwojo | 402  | 204  | 148  | 109  |
| 19 | Sendang | 625  | 506  | 340  | 439  |
| **Jumlah** | 12.958  | 8.082  | 18.412  | 10.335  |

 *Data Primer LPA Tulungagung,2010*

Grafik 4.5 Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Tulungagung

 *Data Primer LPA Tulungagung, 2010*

Grafik 4.6 Perkembangan Jumlah Pekerja Migran (Bukan TKI)

 *Data Primer LPA Tulungagung, 2010*

Sementara lokasi yang rawan bagi terjadinya trafiking dan ESA di Tulungagung adalah Kecamatan Kauman dan Tulungagung.

Tabel 4.8 Tempat Hiburan Khusus Rawan Trafiking

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kecamatan** | **Cafe** | **Bilyar** | **Warung Cethe** | **Warung Remang** |
| 1 | Besuki | 0 | 4 | 10 | 0 |
| 2 | Bandung | 8 | 18 | 18 | 0 |
| 3 | Pakel | 2 | 8 | 16 | 2 |
| 4 | Campurdarat | 7 | 24 | 18 | 0 |
| 5 | Tanggunggunung | 1 | 8 | 7 | 0 |
| 6 | Kalidawir | 8 | 15 | 6 | 0 |
| 7 | Pucanglaban | 0 | 9 | 6 | 0 |
| 8 | Rejotangan | 7 | 16 | 8 | 3 |
| 9 | Ngunut | 18 | 46 | 60 | 0 |
| 10 | Sumbergempol | 18 | 32 | 68 | 0 |
| 11 | Boyolangu | 13 | 41 | 135 | 1 |
| 12 | Tulungagung | 18 | 44 | 204 | 12 |
| 13 | Kedungwaru | 21 | 53 | 189 | 77 |
| 14 | Ngantru | 3 | 21 | 19 | 4 |
| 15 | Karangrejo | 204 | 12 | 72 | 0 |
| 16 | Kauman | 10 | 44 | 207 | 0 |
| 17 | Gondang | 2 | 44 | 124 | 0 |
| 18 | Pagerwojo | 1 | 40 | 80 | 0 |
| 19 | Sendang | 2 | 37 | 32 | 0 |
| **Jumlah** | 343 | 516 | 1279 | 99 |

 *Data Primer LPA Tulungagung, 2010*

**Anak dan Perempuan Korban Kekerasan**

 Kekerasan terhadap anak dan perempuan termasuk KDRT dapat menimbulkan kesengsaraan fisik, psikis bahkan seksual. Dampak kekerasan dapat menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat untuk kekerasan fisik dan mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya atau penderitaan psikis berat yang menimbulkan perlakuan menyimpang. Mengingat hebatnya dampak yang terjadi bahkan terutama dalam kasus yang berat maka pemerintah memberikan jaminan hak terhadap korban melalui PPTP2A berupa :

* Layanan medis termasuk medicolegal;
* Pendampingan untuk proses hukum;
* Dijamin kerahasiaannya;
* Pendapingan rohani dan rehabilitasi trauma psikis.

Pelaku kekerasan terhadap anak kecenderungannya adalah orang-orang yang sangat dekat dengan anak antara lain, ayah dan ibu di rumah, guru di sekolah, majikan di tempat kerja dan sebagainya. Data kekerasan di sekolah dan rumah yang diungkapkan anak-anak anggota DPA (Dewan Perwakilan Anak) dalam penelitian terhadap teman-temannya di atas juga mengungkapkan bentuk-bentuk kekerasan fisik, psikis dan seksual yang dapat dialami anak. Gejala bullying atau kekerasan sebaya di dunia pendidikan akibat senioritas, perilaku anak yang mendorong temannya untuk melakukan kekerasan atau anak-anak yang telah menjadi korban kekerasan dalam keluarga kemudian menjadi pelaku terhadap temannya.

 Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Perempuan hampir sama dengan yang dialami anak-anak. Namun ada juga bentuk kekerasan dan diskriminasi yang berakar dari situasi dan budaya, yang terjadi di Tulungagung antara lain :

* Penelantaran nafkah termasuk pengiriman perempuan menjadi TKI;
* Ditinggal berselingkuh;
* Kekerasan seksual, fisik dan mental.

Perempuan menjadi pelaku juga dapat terjadi, baik terhadap anak maupun suami. Hal ini didorong dengan semakin terbukanya budaya di masyarakat dan besarnya peran perempuan di publik atau adanya tekanan akibat KDRT yang membuat anak menjadi pelampiasan. Siapapun pelaku kekerasan baik perempuan maupun laki-laki, posisi anak-anak tetap menjadi korban akibat konflik yang terjadi pada orang tuanya.

 Beberapa kekerasan yang terjadi terhadap anak dan perempuan ada yang sudah mendapatkan pelayanan terpadu termasuk pelayanan hukum. Namun masih banyak kasus kekerasan yang seharusnya penuntut tindakan hukum bagi pelaku justru tidak dilaporkan karena ketidakmampuan dan ketidakberanian korban.

Tabel 4.9 Data Anak dan Perempuan yang Terlibat Tindak Pidana Baik sebagai Korban maupun Pelaku

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TAHUN** | **JENIS TINDAK PIDANA** | **TERSANGKA** | **KORBAN** |
| **LAKI-LAKI** | **PEREMPUAN** | **LAKI-LAKI** | **PEREMPUAN** |
| 2009 | Penganiayaan  | 7 | 10 | 6 | 17 |
| Perlindungan Anak | 5 | 1 | 1 | 18 |
| Membawa pergi perempuan yang belum dewasa | 1 | - | - | 14 |
| Pencurian | 32 | 13 | 2 | 3 |
| Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) | - | - | - | 24 |
| Perjudian jenis togel | 2 | 20 | - | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TAHUN** | **JENIS TINDAK PIDANA** | **TERSANGKA** | **KORBAN** |
| **LAKI-LAKI** | **PEREMPUAN** | **LAKI-LAKI** | **PEREMPUAN** |
| Sampai Juni 2010 | Penganiayaan  | - | 2 | - | 3 |
| Perlindungan Anak | 2 | 1 | - | 11 |
| Membawa pergi perempuan yang belum dewasa | - | - | - | 6 |
| Pencurian | 5 | 2 | 1 | 1 |
| Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) | - | - | - | 11 |
| Perjudian jenis togel | - | 3 | - | - |

 *Kepolisian Resort Tulungagung,2010*

**Anak dan Perempuan Berkonflik Hukum**

Anak berkonflik hukum atau dikenal dengan anak pelaku kriminal pada dasarnya adalah korban. Mereka menjadi pelaku karena mendapatkan perlakuan berupa penelantaran atas hak pendidikan agama, kasih sayang atau bahkan pemenuhan kebutuhan sehingga mereka mencari jalan pintas dan menjurus kepada tindakan kriminal. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa tidak sedikit anak yang menjadi korban kejahatan dan eksploitasi dari orang dewasa, dan tidak sedikit pula anak-anak yang melakukan perbuatan menyimpang, yaitu kenakalan hingga mengarah pada bentuk tindakan kriminal, seperti narkoba, minuman keras, perkelahian, pengrusakan, pencurian bahkan bisa sampai pada melakukan tindakan pembunuhan. Perilaku menyimpang yang dilakukan anak ini disebabkan oleh beberapa faktor internal maupun eksternal dari si anak, di antaranya adalah perkembangan fisik dan jiwanya (emosinya) yang belum stabil, mudah tersinggung dan peka terhadap kritikan, serta karena disebabkan pengaruh lingkungan sosial di mana anak itu berada.(Gatot Supramono, 2000:4).

 Anak dan perempuan yang berkonflik hukum dan diproses hukum formal secara otomatis tercabut kebebasannya bahkan mendapatkan stigma di masyarakat. Belum lagi apabila ada ancaman kekerasan fisik maupun seksual dari personal di dalam LAPAS dan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan diri. Beberapa anak dan perempuan yang berhadapan hukum tahun 2010 adalah :

Tabel 4.10 Tambahan Narapidana Termasuk Pidana Kurungan Pengganti Denda Menurut Jenis Kejahatan/Pelanggaran dan Jenis Kelamin

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Kejahatan/Pelanggaran** | **Narapidana** |
| **Wanita Dewasa** | **Anak Perempuan** |
| > 1th | 3bl-1th | 0-3 bl | > 1th | 3bl-1th | 0-3 bl |
| 1 | Politik |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Terhadap Kepala Negara |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Terhadap Ketertiban Umum |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 4 | Pembakaran |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Penyuapan |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Mata Uang |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Memalsu Materai |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kesusilaan |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Perjudian |  | 10 | 2 |  |  |  |
| 10 | Penculikan |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pembunuhan |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Penganiayaan |  | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Pencurian |  | 3 |  |  |  |  |
| 14 | Perampokan |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Memeras/Mengancam |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Penggelapan |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Penipuan  |  | 2 |  |  |  |  |
| 18 | Merusak Barang |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Dalam Jabatan |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Penadahan |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ekonomi |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Subversi |  |  |  |  |  |  |
| 23 | UU No. 5 Tahun 1997 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | UU No. 23 Tahun 1992 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 25 | UU No. 19 Tahun 2004 (kayu ilegal) |  |  |  |  |  |  |
| 26 | UU No. 12 Tahun 1951 (Sajam) |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Penyelundupan |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Pelanggaran (Pasal 505 KUHP) |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Kenakalan/Kealpaan |  |  |  |  |  |  |
| 30 | PSK |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Hak Cipta |  |  |  |  |  |  |
| 32 | UU Perlindungan Anak |  |  |  | 1 |  |  |
| 33 | UU KDRT |  |  |  |  |  |  |
| 34 | UU Tentang Tenaga Kerja |  |  |  |  |  |  |
| 35 | UU Perbankan |  |  |  |  |  |  |
| 36 | UU Migas |  |  |  |  |  |  |
| 37 | UU Korupsi |  |  |  |  |  |  |
| 38 | UU Imigrasi |  |  |  |  |  |  |
| 39 | UU Trafiking |  | 2 |  |  |  |  |

 *Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tulungagung, 2010*

Tabel 4.11 Jenis Kejahatan/Pelanggaran menurut Status dan Jenis Kelamin

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Kejahatan/Pelanggaran** | **Narapidana** | **Total** | **Tahanan** |
| **L** | **P** | **L** | **P** |
| 1 | Politik |  |  |  |  |  |
| 2 | Terhadap Kepala Negara |  |  |  |  |  |
| 3 | Terhadap Ketertiban Umum | 40 |  | 40 | 44 | 1 |
| 4 | Pembakaran |  |  |  |  |  |
| 5 | Penyuapan |  |  |  |  |  |
| 6 | Mata Uang | 3 |  | 3 | 2 |  |
| 7 | Memalsu Materai | 7 | 1 | 8 | 8 | 1 |
| 8 | Kesusilaan | 5 |  | 5 | 2 |  |
| 9 | Perjudian | 204 | 26 | 230 | 239 | 44 |
| 10 | Penculikan | 6 |  | 6 | 10 |  |
| 11 | Pembunuhan | 6 |  | 6 | 7 |  |
| 12 | Penganiayaan | 19 |  | 19 | 23 |  |
| 13 | Pencurian | 100 | 6 | 106 | 131 | 8 |
| 14 | Perampokan | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 |
| 15 | Memeras/Mengancam | 3 |  | 3 | 4 |  |
| 16 | Penggelapan | 19 | 2 | 21 | 22 | 5 |
| 17 | Penipuan  | 19 | 5 | 24 | 36 | 4 |
| 18 | Merusak Barang |  |  |  |  |  |
| 19 | Dalam Jabatan |  |  |  |  |  |
| 20 | Penadahan | 9 |  | 9 | 10 |  |
| 21 | Ekonomi |  |  |  |  |  |
| 22 | Subversi |  |  |  |  |  |
| 23 | UU No. 5 Tahun 1997 | 17 | 3 | 20 | 20 | 1 |
| 24 | UU No. 23 Tahun 1992 | 34 | 1 | 35 | 72 | 2 |
| 25 | UU No. 19 Tahun 2004 (kayu ilegal) | 19 | 1 | 20 | 16 |  |
| 26 | UU No. 12 Tahun 1951 (Sajam) | 9 |  | 9 | 17 |  |
| 27 | Penyelundupan |  |  |  |  |  |
| 28 | Pelanggaran (Pasal 505 KUHP) |  |  |  |  |  |
| 29 | Kenakalan/Kealpaan | 28 | 1 | 29 | 22 | 1 |
| 30 | UU KDRT | 3 |  | 3 | 2 |  |
| 31 | Hak Cipta | 2 |  | 2 |  |  |
| 32 | UU Perlindungan Anak | 12 |  | 12 | 8 |  |
| 33 | PSK |  |  |  |  |  |
| 34 | UU Tentang Tenaga Kerja | 1 |  | 1 |  |  |
| 35 | UU Perbankan | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 36 | UU Migas | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 37 | UU Korupsi | 1 |  | 1 | 6 |  |
| 38 | UU Imigrasi | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 39 | UU Trafiking |  |  |  | 1 | 2 |

 *Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tulungagung, 2010*

Tabel 4.12 Jenis Kejahatan/Pelanggaran menurut Status dan Jenis Kelamin

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Kejahatan/Pelanggaran** | **Narapidana** | **Total** | **Tahanan** |
| **L** | **P** | **L** | **P** |
| 1 | Politik |  |  |  |  |  |
| 2 | Terhadap Kepala Negara |  |  |  |  |  |
| 3 | Terhadap Ketertiban Umum | 21 | 1 | 22 | 28 | 1 |
| 4 | Pembakaran |  |  |  |  |  |
| 5 | Penyuapan |  |  |  |  |  |
| 6 | Mata Uang | 2 |  | 2 |  |  |
| 7 | Memalsu Materai | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 8 | Kesusilaan |  |  |  | 2 |  |
| 9 | Perjudian | 95 | 12 | 107 | 147 | 23 |
| 10 | Penculikan | 3 |  | 3 | 4 | 1 |
| 11 | Pembunuhan |  |  |  | 1 |  |
| 12 | Penganiayaan | 7 |  | 7 | 11 |  |
| 13 | Pencurian | 41 | 3 | 44 | 72 | 4 |
| 14 | Perampokan | 7 | 1 | 8 | 6 |  |
| 15 | Memeras/Mengancam | 8 |  | 8 | 6 |  |
| 16 | Penggelapan | 14 | 2 | 16 | 4 | 1 |
| 17 | Penipuan  | 2 |  | 2 | 14 | 2 |
| 18 | Merusak Barang |  |  |  |  |  |
| 19 | Dalam Jabatan |  |  |  |  |  |
| 20 | Penadahan | 3 |  | 3 | 4 |  |
| 21 | Ekonomi |  |  |  |  |  |
| 22 | Subversi |  |  |  |  |  |
| 23 | UU No. 5 Tahun 1997 | 6 |  | 6 | 13 | 1 |
| 24 | UU No. 23 Tahun 1992 | 20 | 2 | 22 | 34 | 3 |
| 25 | UU No. 19 Tahun 2004 (kayu ilegal) | 5 |  | 5 | 7 |  |
| 26 | UU No. 12 Tahun 1951 (Sajam) | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 27 | Penyelundupan |  |  |  |  |  |
| 28 | Pelanggaran (Pasal 505 KUHP) |  |  |  |  |  |
| 29 | Kenakalan/Kealpaan | 6 |  | 6 | 11 |  |
| 30 | UU KDRT |  |  |  | 1 |  |
| 31 | Hak Cipta |  |  |  |  |  |
| 32 | UU Perlindungan Anak | 6 | 1 | 7 | 16 | 1 |
| 33 | PSK | 2 |  | 2 |  |  |
| 34 | UU Tentang Tenaga Kerja |  |  |  | 4 | 1 |
| 35 | UU Perbankan |  |  |  |  |  |
| 36 | UU Migas |  |  |  |  |  |
| 37 | UU Korupsi |  |  |  | 6 |  |
| 38 | UU Imigrasi |  |  |  |  |  |
| 39 | UU Trafiking |  | 2 | 2 | 1 | 2 |

 *Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tulungagung, 2010*

**Anak Korban Iklan Rokok**

Rokok jelas-jelas merugikan kesehatan baik bagi pemakainya maupun orang-orang disekitarnya. Orang berhenti merokok apabila sudah sakit dan remaja hari ini adalah calon pelanggan tetap hari esok, karena mayorotas perokok memulai merokok ketika remaja. Perokok remaja adalah satu-satunya sumber perokok pengganti. Jika remaja tidak merokok maka industri rokok akan bangkrut sebagaimana sebuah masyarakat yang tidak melahirkan generasi penerus akan punah. Perlindungan remaja dari pengaruh iklan rokok sangat mendesak, mengingat menurut berbagai penelitian menunjukkan adanya korelasi kuat antara iklan rokok dengan terjadinya peningkatan komsumsi rokok. Strategi pengusaha rokok banyak memasang iklan yang mendukung kegiatan remaja maupun menampilkan prestasi karena rokok meskipun itu kebohongan belaka. Beberapa acara yang sering didukung oleh pabrik rokok antara lain musik, olah raga, seni budaya, keagamaan dan lain-lain. Meskipun ada beberapa CSR yang dilakukan pabrik rokok untuk penanggulangan bencana, pendidikan, ekonomi, lingkungan hidup, namun biaya sosial yang harus ditanggung negara untuk masyarakat miskin yang terkena penyakit jantung, sesak napas dan penyakit kronis akibat rokok lainnya jauh lebih besar.

 Data remaja sekolah yang perokok ada pada bab 2 dalam sub bab pola hidup sehat, sedangkan remaja DO hampir dipastikan lebih banyak yang merokok akibat pengaruh lingkungan kerja dan pergaulan. Berikut data prosentase iklan rokok berbagai media dalam 2 (dua) bulan terakhir Nopember – Desember 2010, di Kabupaten Tulungagung :

Tabel 4.13 Observasi Iklan rokok di Televisi dan Ruang Publik Nopember 2010

|  |  |
| --- | --- |
| **Media** | **Situasi Iklan Rokok** |
| Televisi |
| ANTV | Setelah jam 21.30 rata-rata 10 iklan ditayangkan dalam 1 jam  |
| Global TV | Setelah jam 21.30 rata-rata 21 iklan ditayangkan dalam 1 jam |
| RCTI | Setelah jam 21.30 rata-rata 6 iklan ditayangkan dalam 1 jam |
| **Surat Kabar** |
| Radar Tulungagung dan Jawa Pos | Pada bulan Nopember 2010 terdapat 38 iklan rokok, rata-rata ½ halaman per hariPada bulan Desember 2010 terdapat 31 iklan rokok, rata-rata ½ halaman per hari |
| **Iklan di Jalan** |
| Iklan Pinggir Jalan | Jalan wilayah pinggiran mencapai 25 iklan per Km dalam bentuk besar belum termasuk poster-poster |
| Jalan menuju kota setiap 10 meter ada iklan rokok dalam bentuk lampu, *name board* toko, papan iklan. |
| Di aloon-aloon yang terpasang hanya iklan rokok |

Dampak iklan rokok pada anak-anak, remaja dan masyarakat menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak antara lain :

* Mendorong mereka untuk mencoba-coba merokok jika cocok menjadi pengguna tetap;
* Menciptakan lingkungan di mana merokok dianggap baik dan biasa;
* Menciptakan ketergantungan media dan lembaga terhadap iklan rokok sehingga membatasi keterbukaan dalam berdiskusi tentang bahaya merokok;
* Mendorong perokok meningkatkan komsumsinya sekaligus mengurangi motivasi mereka berhenti merokok.

Perda Kawasan Tanpa Asap Rokok yang dihasilkan tahun 2010, hanya membatasi ruang tidak boleh merokok. Belum ada komitmen tegas karena sebagian pihak yang seharusnya berperan dalam pelarangan iklan rokok karena sebagian mereka adalah perokok dan mereka belum paham membangun transisi bagi petani tembakau dan buruh pabrik rokok, belum lagu ketergantungan terhadap cukai rokok.

**Anak dan Perempuan beresiko HIV & AIDS**

 Penyakit HIV & AIDS berawal dari perilaku menyimpang secara seksual yang kemudian menular pada pihak-pihak yang tidak bersalah seperti pasangan, anak maupun orang yang tidak sengaja mengalami kontak dengan penderita. AIDS (acquired Immune Deficiency Syndrome) merupakan beberapa gejala akibat penurunan kekebalan tubuh yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus) atau virus penyebab melemahnya sistem kekebalan tubuh (sel darah putih). Penyakit ini menular melalui :

* Penggunaan jarum suntik secara bergantian atau bekas pakai;
* Tranfusi darah atau luka terbuka yang terkena darah penderita;
* Free seks atau berhubungan seks dengan penderita;
* Dari ibu (penderita) ke bayi melalui hamil, melahirkan dan menyusui.

 Seperti dijelaskan di bab 2 tentang kesehatan, bahwa anak sekolah yang mencoba narkoba SD sebanyak 2 orang; SMP 66 orang; SMA 43 orang dan SMK 25 orang, mereka dapat dikategorikan beresiko sebab biasanya kegiatan tersebut banyak menjurus kepada mencoba seks bebas atau jika mereka menggunkan jarum suntik. Kelompok beresiko lainnya adalah mereka yang telah melakukan seks bebas atau berani mengakses tempat hiburan yang rawan prostitusi.

Tabel 4. 14 Pelajar dan seks bebas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sekolah** | **Anak Sekolah yang Pernah Melakukan Hubungan Seks** | **Responden** | **Prosentase** |
| **L** | **P** | **L** | **P** | **L** | **P** |
| SD | - | - | 29.301 | 27.994 | - | - |
| SMP | 14 | 28 | 16.205 | 16.301 | 0,09 | 0,17 |
| SMA | 15 | 9 | 2.579 | 3.694 | 0,58 | 0,24 |
| SMK | 0 | 0 | 4.049 | 4.164 | 0 | 0 |

 *Data Primer LPA Tulungagung,2010*

 Besarnya jumlah penderita dan kelompok beresiko membutuhkan kepedulian semua pihak terutama dalam ranah pencegahan. Waspadai usia rentan remaja yang sedang mencari jati diri, selalu ingin mencoba, gampang terpengaruh teman karena butuh diterima oleh komunitasnya. Komunikasi dan pemantauan yang tidak mengekang merupakan upaya deteksi orang tua untuk membaca gejala yang dapat menjerumuskan anak dalam kelompok beresiko.

**Anak Korban Kehamilan tidak dikehendaki**

Proses kehamilan selalu dinantikan dalam keluarga dan diperlakuan khusus demi menjaga keselamatan ibu dan bayi. Kehamilan yang tidak dikehendaki pada perempuan dapat terjadi akibat hubungan di luar nikah, korban pemerkosaan maupun pasangan suami istri yang sudah tidak menginginkan anak lagi. Praktek pengguguran kandungan rawan terjadi pada kehamilan yang demikian. Bahkan untuk kehamilan di luar nikah anak yang dipertahankan untuk tetap dilahirkan rawan mendapatkan stigma negatif dari masyarakat. Sehingga perlu disosialisasikan bahwa setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah sehingga tidak perlu didiskriminasikan.

 Dalam perkembangannya kehamilan tidak dikehendaki dapat memberikan efek domino berupa perlakuan salah kepada anak yang dilahirkan. Disamping kedua resiko diatas saat ini banyak diketemukan pemalsuan identitas anak dalam akta kelahiran, bayi ditinggal di rumah bersalin atau dibuang. Dalam kasus ini anak juga rawan menjadi korban adopsi ilegal bahkan trafiking dengan modus adopsi ilegal. Padahal jika tidak ada kejelasan nasab atau garis keturunan, bukan tidak mungkin anak-anak tersebut ketika dewasa menikah dengan saudaranya. Berikut data anak-anak yang dilahirkan di luar status perkawinan yang sah.

Tabel 4.15 Anak di Luar Nikah dan Anak yang Dibawa Pulang TKW Hasil di Luar Nikah Berdasar Kecamatan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kecamatan** | **Anak Lahir** **di Luar Nikah** | **Anak TKW Dibawa Pulang di Luar Nikah** |
| Besuki | 5 | 4 |
| Bandung | 52 | 24 |
| Pakel | 24 | 6 |
| Campurdarat | 16 | 5 |
| Tanggunggunung | 3 | 0 |
| Kalidawir | 39 | 14 |
| Pucanglaban | 19 | 2 |
| Rejotangan | 39 | 27 |
| Ngunut | 31 | 4 |
| Sumbergempol | 35 | 6 |
| Boyolangu | 74 | 6 |
| Tulungagung | 21 | 4 |
| Kedungwaru | 65 | 14 |
| Ngantru | 71 | 17 |
| Karangrejo | 48 | 6 |
| Kauman  | 77 | 19 |
| Gondang | 81 | 9 |
| Pagerwojo | 58 | 4 |
| Sendang | 35 | 7 |
| **Total** | 793 | 178 |

 *Data primer LPA Tulungagung, 2010*

**Perempuan Penyandang Cacat dan Anak Lemah** **Mental**

Setiap makhluk pasti memiliki kelebihan meskipun ada kekurangan yang kasat mata pasti ada sisi kelebihan yang harus diasah agar menjadi nilai lebih bagi seseorang. Penyandang cacat mengalami hambatan dalam beraktifitas akibat ketidaksempurnaan bagian tubuh dibanding manusia pada umumnya. Kondisi ini yang menyebabkan mereka dikategorikan dalam salah satu PMKS (Penyandang Masalah Kerawanan Sosial). Anak-anak cacat dalam Undang-undang Perlindungan Anak harus dijamin hak pendidikannya dengan penyediaan Sekolah Luar Biasa (SLB). Permasalahan akan muncul apabila SLB sulit diakses karena terlalu jauh, anak tidak ada yang mengantar sekolah atau orang tuanya harus bekerja untuk kebutuhan nafkahnya maka anak tidak bersekolah. Situasi ini rawan menimbulkan ketergantungan pada penyandang cacat pada keluarga sehingga tidak mampu mandiri atau menggunakan kecacatannya untuk meminta belas kasihan.

Pada anak penyandang cacat, kondisi ini dapat mengganggu tumbuh kembang mereka. Negara wajib menjamin penyandang cacat untuk menikmati hidup secara layak yang menjamin martabat, dengan meningkatkan percaya diri dan mempermudah peran serta aktif mereka di masyarakat. Realisasi jaminan tersebut malalui penyediaan pendidikan luar biasa yang berkualitas, pelayanan kesehatan, rehabilitasi dan persiapan untuk bekerja serta peluang berekreasi. Beberapa hal yang harus dievaluasi, selama ini penyandang cacat banyak diberi kesempatan untuk pekerjaan yang bersifat memproduksi barang, kecuali mereka yang mendapat dukungan khusus keluarga dapat berhasil menjadi profesional. Hal ini masih menunjukkan bahwa penyandang cacat dipandang sebagai warga negara kelas dua.

Tabel 4.16 Penyandang Cacat Netra

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kecamatan** | **Penderita Cacat Netra** | **Jumlah** |
| **Laki-Laki** | **Perempuan** |
| 1 | Besuki | 6 | 10 | 16 |
| 2 | Bandung | 28 | 21 | 49 |
| 3 | Pakel | 29 | 17 | 46 |
| 4 | Campurdarat | - | - | - |
| 5 | Tanggunggunung | 4 | 3 | 7 |
| 6 | Kalidawir | 19 | 9 | 28 |
| 7 | Pucanglaban | 1 | 5 | 6 |
| 8 | Rejotangan | - | 1 | 1 |
| 9 | Ngunut | 23 | 18 | 41 |
| 10 | Sumbergempol | 11 | 5 | 16 |
| 11 | Boyolangu | 13 | 13 | 26 |
| 12 | Tulungagung | 16 | 7 | 23 |
| 13 | Kedungwaru | 13 | 13 | 26 |
| 14 | Ngantru | 21 | 12 | 33 |
| 15 | Karangrejo | - | - | - |
| 16 | Kauman | 23 | 12 | 35 |
| 17 | Gondang | 38 | 21 | 59 |
| 18 | Pagerwojo | 46 | 33 | 79 |
| 19 | Sendang | 29 | 6 | 35 |
| **Jumlah** | 320 | 206 | 526 |

 *Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung,2010*

Tabel 4.17 Penyandang Cacat Tubuh

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kecamatan** | **Penderita Cacat Tubuh** | **Jumlah** |
| **Laki-Laki** | **Perempuan** |
| 1 | Besuki | 15 | 13 | 28 |
| 2 | Bandung | 38 | 27 | 65 |
| 3 | Pakel | 63 | 43 | 106 |
| 4 | Campurdarat | 9 | 6 | 15 |
| 5 | Tanggunggunung | 9 | 8 | 17 |
| 6 | Kalidawir | 36 | 31 | 67 |
| 7 | Pucanglaban | 4 | 2 | 6 |
| 8 | Rejotangan | 2 | - | 2 |
| 9 | Ngunut | 9 | 7 | 16 |
| 10 | Sumbergempol | 39 | 27 | 66 |
| 11 | Boyolangu | 34 | 22 | 56 |
| 12 | Tulungagung | 35 | 14 | 49 |
| 13 | Kedungwaru | 23 | 19 | 42 |
| 14 | Ngantru | 30 | 20 | 50 |
| 15 | Karangrejo | 45 | 35 | 80 |
| 16 | Kauman | 18 | 16 | 34 |
| 17 | Gondang | 31 | 28 | 59 |
| 18 | Pagerwojo | 50 | 45 | 95 |
| 19 | Sendang | 44 | 25 | 69 |
| **Jumlah** | 534 | 388 | 922 |

 *Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung, 2010*

Tabel 4.18 Penyandang Cacat Mental

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kecamatan** | **Penderita Cacat Mental** | **Jumlah** |
| **Laki-Laki** | **Perempuan** |
| 1 | Besuki | 14 | 15 | 29 |
| 2 | Bandung | 18 | 10 | 28 |
| 3 | Pakel | 29 | 20 | 49 |
| 4 | Campurdarat | 7 | 8 | 15 |
| 5 | Tanggunggunung | 10 | 8 | 18 |
| 6 | Kalidawir | 14 | 8 | 22 |
| 7 | Pucanglaban | 7 | 4 | 11 |
| 8 | Rejotangan | 1 | - | 1 |
| 9 | Ngunut | 5 | 4 | 9 |
| 10 | Sumbergempol | 18 | 19 | 37 |
| 11 | Boyolangu | 23 | 18 | 41 |
| 12 | Tulungagung | 14 | 2 | 16 |
| 13 | Kedungwaru | 20 | 20 | 40 |
| 14 | Ngantru | 34 | 43 | 77 |
| 15 | Karangrejo | - | 1 | 1 |
| 16 | Kauman | 15 | 11 | 26 |
| 17 | Gondang | 58 | 38 | 96 |
| 18 | Pagerwojo | 13 | 9 | 22 |
| 19 | Sendang | 12 | 7 | 19 |
| **Jumlah** | 312 | 245 | 557 |

 *Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung,2010*

Tabel 4.19 Penyandang Cacat Rungu Wicara

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kecamatan** | **Penderita Cacat Rungu Wicara** | **Jumlah** |
| **Laki-Laki** | **Perempuan** |
| 1 | Besuki | - | - | - |
| 2 | Bandung | - | - | - |
| 3 | Pakel | 25 | 14 | 39 |
| 4 | Campurdarat | 5 | 5 | 10 |
| 5 | Tanggunggunung | 4 | 2 | 6 |
| 6 | Kalidawir | - | - | - |
| 7 | Pucanglaban | 4 | 5 | 9 |
| 8 | Rejotangan | 5 | 3 | 8 |
| 9 | Ngunut | - | - | - |
| 10 | Sumbergempol | 10 | 8 | 18 |
| 11 | Boyolangu | 21 | 21 | 42 |
| 12 | Tulungagung | 16 | 7 | 23 |
| 13 | Kedungwaru | 11 | 12 | 23 |
| 14 | Ngantru | 16 | 25 | 41 |
| 15 | Karangrejo | - | - | - |
| 16 | Kauman | 6 | 4 | 10 |
| 17 | Gondang | 1 | 3 | 4 |
| 18 | Pagerwojo | 1 | - | 1 |
| 19 | Sendang | 10 | 5 | 15 |
| **Jumlah** | 135 | 114 | 249 |

 *Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung, 2010*

Tabel 4.20 Anak Penyandang Cacat Mental di Bawah 18 Tahun menurut Kecamatan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Kecamatan** | **Anak Penyandang Cacat Mental** |
| 1 | Besuki | 19 |
| 2 | Bandung | 45 |
| 3 | Pakel | 35 |
| 4 | Campurdarat | 26 |
| 5 | Tanggunggunung | 28 |
| 6 | Kalidawir | 117 |
| 7 | Pucanglaban | 20 |
| 8 | Rejotangan | 76 |
| 9 | Ngunut | 43 |
| 10 | Sumbergempol | 86 |
| 11 | Boyolangu | 59 |
| 12 | Tulungagung | 38 |
| 13 | Kedungwaru | 53 |
| 14 | Ngantru | 45 |
| 15 | Karangrejo | 49 |
| 16 | Kauman | 51 |
| 17 | Gondang | 62 |
| 18 | Pagerwojo | 47 |
| 19 | Sendang | 78 |
| **Jumlah** | **977** |

 *Data Primer LPA Tulungagung,2010*

**Anak Yatim Piatu dan Anak Terlantar**

Anak-anak yang tidak berada dalam keluarga inti karena berbagai sebab memerlukan pengasuhan pengganti agar tetap mendapatkan dukungan tumbuh kembang yang baik. Kebijaksanaan Kementrian Sosial berkaitan dengan Pengasuhan Pengganti (Alternatif Care) keluarga menjadi pilihan prioritas dengan mengadopsi sistem kafalah dalam budaya Islam. Jika keluarga inti tidak ada maka dicarikan kerabat yang memenuhi syarat. Jika kerabat tidak ada atau tidak memenuhi syarat maka dicarikan keluarga pengganti dengan syarat-syarat khusus. Pengasuhan lembaga sebenarnya merupakan pilihan terakhir bagi anak-anak yang memerlukan pengasuhan pengganti. Disamping anak-anak yang ditelantarkan orang tuanya anak yatim/piatu adalah anak-anak yang salah satu atau kedua orang tuanya sudah meninggal termasuk kehilangan hak pengasuhan. Meskipun demikian sebagian besar anak yatim masih berada dalam pengasuhan keluarga inti. Beberapa anak-anak tersebut ada yang hidup di panti asuhan terutama mereka yang sudah tidak mempunyai wali. Pengasuhan di dalam panti merupakan bentuk perlindungan negara atau partisipasi masyarakat untuk memberikan lingkungan keluarga pengganti. Kelemahan pengasuhan lembaga adalah perlakuan masal dan perbandingan pengasuh dan anak-anak yang tidak seimbang sehingga menyebabkan anak-anak tidak dapat diperlakukan secara spesifik sesuai kepribadiannya. Di Kabupaten Tulungagung semua panti asuhan dikelola oleh masyarakat melalui yayasan keagamaan.

Tabel 4.21 Anak Yatim di Panti Asuhan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kecamatan** | **Laki-Laki** | **Perempuan** | **Jumlah** |
| 1 | Besuki | 157 | 135 | 292 |
| 2 | Bandung | 33 | 32 | 65 |
| 3 | Pakel | 305 | 289 | 594 |
| 4 | Campurdarat | 61 | 68 | 129 |
| 5 | Tanggunggunung | 166 | 143 | 309 |
| 6 | Kalidawir | 282 | 319 | 601 |
| 7 | Pucanglaban | 142 | 141 | 283 |
| 8 | Rejotangan | 135 | 160 | 295 |
| 9 | Ngunut | - | - | - |
| 10 | Sumbergempol | 380 | 48 | 428 |
| 11 | Boyolangu | 148 | 470 | 618 |
| 12 | Tulungagung | 78 | 121 | 199 |
| 13 | Kedungwaru | 130 | 65 | 195 |
| 14 | Ngantru | 31 | 75 | 106 |
| 15 | Karangrejo | 36 | 25 | 61 |
| 16 | Kauman | 31 | 17 | 48 |
| 17 | Gondang | 54 | 18 | 72 |
| 18 | Pagerwojo | 168 | 70 | 238 |
| 19 | Sendang | 44 | 133 | 177 |
| **Jumlah** | 2.381 | 2.329 | 4.710 |

 *Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung,2010*

Tabel 4.22 Anak Sekolah yang Sudah Yatim/Piatu/Yatim Piatu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sekolah** | **Anak Sekolah yang Menjadi Yatim/Piatu** | **Responden** | **Prosentase** |
| **L** | **P** | **L** | **P** | **L** | **P** |
| SD | 955 | 630 | 29.301 | 27.994 | 3,26 | 2,25 |
| SMP | 530 | 508 | 16.205 | 16.301 | 3,27 | 3,12 |
| SMA | 178 | 228 | 2.579 | 3.694 | 6,90 | 6,17 |
| SMK | 70 | 133 | 4.049 | 4.164 | 1,73 | 3,19 |

 *Data Primer LPA Tulungagung,2010*

**Lingkungan bagi anak**

 Lingkungan masyarakat, gaya hidup, kemudahan akses terhadap hal tertentu dapat mewarnai perilaku anak-anak dan masyarakat pada umumnya. Akses IT yang seharusnya memberikan dukungan ketrampilan hidup pada anakpun dapat berpengaruh negatif jika digunakan berlebihan atau disalahgunakan. Relasi dengan teman merupakan potensi untuk saling mendukung, berbagi, bertukar pikiran dapat berubah menjadi ancaman atau menyeret ke dalam kehidupan yang suram dan memupuskan harapan masa depan anak apabila teman mendorong perilaku buruk.

 Peta situasi kerentanan anak dapat digunakan untuk menyusun upaya pencegahan atau membangun budaya positip pada setiap perilaku atau lingkungan rentan anak. Bekal pendidikan keluarga terhadap batasan-batasan hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dapat dijadikan bekal agar anak-anak pandai membuat keputusan yang tepat.

Tabel 4.23 Kelompok Miras dan PS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kecamatan** | **Play Station** | **Kelompok Judi** |
| 1 | Besuki | 13 | 0 |
| 2 | Bandung | 21 | 1 |
| 3 | Pakel | 20 | 0 |
| 4 | Campurdarat | 28 | 0 |
| 5 | Tanggunggunung | 3 | 0 |
| 6 | Kalidawir | 14 | 0 |
| 7 | Pucanglaban | 3 | 0 |
| 8 | Rejotangan | 23 | 1 |
| 9 | Ngunut | 38 | 8 |
| 10 | Sumbergempol | 27 | 1 |
| 11 | Boyolangu | 39 | 1 |
| 12 | Tulungagung | 51 | 0 |
| 13 | Kedungwaru | 64 | 9 |
| 14 | Ngantru | 34 | 2 |
| 15 | Karangrejo | 20 | 0 |
| 16 | Kauman | 49 | 0 |
| 17 | Gondang | 28 | 1 |
| 18 | Pagerwojo | 15 | 0 |
| 19 | Sendang | 8 | 1 |
| **Jumlah** | 498 | 25 |

 *Data Primer LPA Tulungagung,2010*

Tabel 4.24 Anak Sekolah yang Mempunyai Pacar

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sekolah** | **Anak Sekolah yang Mempunyai Pacar** | **Responden** | **Prosentase** |
| **L** | **P** | **L** | **P** | **L** | **P** |
| SD | 94 | 77 | 29.301 | 27.994 | 0,32 | 0,28 |
| SMP | 1.285 | 2.090 | 16.205 | 16.301 | 7,93 | 12,82 |
| SMA | 843 | 1.351 | 2.579 | 3.694 | 32,69 | 36,57 |
| SMK | 1.390 | 1.743 | 4.049 | 4.164 | 34,33 | 41,86 |

 *Data Primer LPA Tulungagung,2010*

Tabel 4.25 Anak Sekolah yang Pernah Terlibat Perkelahian

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sekolah** | **Anak Sekolah yang Pernah Terlibat Perkelahian** | **Responden** | **Prosentase** |
| **L** | **P** | **L** | **P** | **L** | **P** |
| SD | 1.452 | 315 | 29.301 | 27.994 | 4,96 | 1,13 |
| SMP | 1.401 | 289 | 16.205 | 16.301 | 8,65 | 1,77 |
| SMA | 197 | 74 | 2.579 | 3.694 | 7,64 | 2,00 |
| SMK | 82 | 23 | 4.049 | 4.164 | 2,03 | 0,55 |

 *Data Primer LPA Tulungagung,2010*

**BAB V**

**KESIMPULAN**

1. **Kesimpulan**

Fakta menunjukkan bahwa layanan publik bagi anak masih mebutuhkan pengembangan lagi. Tempat bermain yang sehat banyak dijumpai di perkotaan, namun juga minim di wilayah perumahan sehingga anak-anak tergantung orang tua untuk menjangkau tempat bermain. Tempat bermain edukatif masih diperlukan beberapa pengembangan di wilayah pedesaan yang mudah dijangkau anak. Demikian pula untuk hal yang berkaitan dengan :

* Sarana olah raga termasuk kolam renang;
* Tempat bermain di lingkungan padat penduduk;
* Taman bacaan;
* Sanggar anak;
* Pendidikan Layanan Khusus;
* Organisasi remaja
* Sarana transportasi ke sekolah yang memadai.
1. **Saran/ Rekomendasi**

Memperhatikan gambaran situasi anak dan perempuan, berkaitan dengan potensi serta beberapa persoalan didalamnya maka pemerintah yang mempunyai kewenangan dan tugas pokok fungsi yang berkaitan dengan perlindungan anak dan perempuan harus segera memberikan respon program. Hal ini juga terbuka bagi pihak non pemerintah yaitu organisasi kemasyarakatan, LSM dan dunia usaha untuk berkomitmen dalam perlindungan anak dan perempuan. Sejak meratifikasi beberapa kesepakatan Internasional, maka negara wajib menindaklanjuti dalam bentuk penguatan landasan hukum dan intervensi program.

 Beberapa rekomendasi yang mendesak untuk ditindaklanjuti dijelaskan menurut bidangnya yaitu :

* Bidang Kesehatan
* Bidang Pendidikan
* Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan
* Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak
* Pembangunan Moral Keagamaan
* Penanganan korban perlakuan salah
* Kebijakan dan Anggaran Pemerintah

 **A. Bidang Kesehatan**

Peningkatan Anggaran Kesehatan dengan menambah jumlah tenaga medis, menguatkan kapasitas tenaga medis serta memperluas jangkauan layanan kesehatan terutama di wilayah akses sulit. Penambahan tenaga medis yang mendesak adalah penambahan dokter umum, Dokter Spesialis Kandungan (SPOG), Dokter Spesialis Anak dan tenaga gizi di beberapa Puskesmas yang belum memiliki ahli gizi.

Peningkatan cakupan ASI ekslusif melalui peningkatan kegiatan sosialisasi dan pencegahan komersialisasi susu formula dalam paket persalinan di bidan dan rumah bersalin. Program Peningkatan cakupan ASI eksklusiif hendaknya dilengkapi telaah yang jeli untuk menganalisa berbagai faktor agar diperoleh pendekatan yang tepat. Untuk kualitas generasi penerus masalah kesehatan remaja putri melalui pencegahan KEK (Kurang Energi Kronik) dan pendidikan kesehatan reproduksi perlu digarap secara merata untuk menghindari BBLR.

Memperluas kawasan bebas asap rokok, tidak hanya di rumah sakit tetapi di kantor pemerintah, sekolah kemudian dilakukan secara bertahap untuk seluruh tempat umum agar anak dan perempuan tidak rentan menjadi perokok pasif.

 **B. Bidang Pendidikan**

Menguatkan kapasitas guru terhadap persoalan yang rentan menimpa anak-anak dan remaja. Sehingga bukan hanya kecerdasan intelektual saja yang harus dibangun kepada siswa tetapi guru mampu membantu siswa yang berada dalam situasi khusus dan sensitif terhadap fenomena yang membuat anak rawan mendapatkan perlakuan salah.

Menghentikan beberapa praktik komersialisasi pendidikan baik yang terang-terangan maupun terselubung agar mencegah angka DO dari anak keluarga miskin. Peran ini dapat dilakukan Dinas Pendidikan maupun DPRD termasuk meninjau ulang berbagai penyeragaman yang justru memberatkan siswa.

Memprioritaskan pengadaan Pendidikan Layanan Khusus bagi anak lemah mental mengingat jumlah mereka cukup banyak minimal per kecamatan ada 33 anak bahkan ada yang lebih dari 200 anak. Tujuan akhir dari proses pendidikan ini adalah agar mereka kelak tidak bergantung pada orang lain dalam aktifitas harian seperti makan dan ke kamar mandi. Walaupun secara ekonomi manusia lemah mental tidak akan dapat produktif.

Melakukan evaluasi dan penguatan terhadap kinerja Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah agar dapat menjalankan fungsi support, advisor, mediator dan control secara optimal. Sehingga mempu memenuhi kekurangan di dunia pendidikan dan dapat menghentikan praktek-praktek yang menghambat tercapainya pendidikan untuk semua.

 **C. Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan**

Pemerintah Kabupaten Tulungagung haruis mempunyai program langsung berkaitan Pekerja Anak, sebab selama ini pendanaan Rencana Aksi Kabupaten Penghapusan BPTA menggunakan dana APBN, APBD Propinsi dan UNICEF.

 Melakukan penegakan hukum kepada pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak dan perempuan yang marak di beberapa industri garmen yang tertutup mengingat jumlah jam kerja yang sangat panjang dan adanya praktek penahanan gaji oleh pengawas ketenagakerjaan.

Razia dan pemberian saksi untuk prostitusi juga diperlakukan bagi germo dan pengguna PsK terutama ESKA agar mampu menimbulkan efek jera sehingga tidak semakin memperbesar bisnis prostitusi. Jika permintaan pasar sepi maka solusi yang dikembangkan untuk pemberdayaan ekonomi lainnya akan mudah direspon.

 **D. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak**

Membuka wadah partisipasi anak secara optimal terutama di desa-desa, agar anak-anak remaja dapat menyalurkan energinya secara positip dan mengambil manfaat untuk perkembangan masa depannya. Bentuk kegiatan dalam wadah tersebut dapat berupa olah raga, seni, kewirausahaan, sosial dan sebagainya. Jika perlu ada perombakan fungsi Karang Taruna agar dapat mewadahi anak-anak yang sudah lulus SD.

 **E. Pembangunan Moral Keagamaan**

Majelis taklim di masyarakat hendaknya difasilitasi untuk menjadi sarana menuntut ilmu keagamaan di masyarakat. Selama ini model kegiatannya mayoritas hanya membaca surat Yasin atau berdzikir, makan dan pulang, sehingga fungsi taklim tidak terealisasi. Akibatnya banyak masyarakat yang kurang paham aturan keagamaan secara benar yang dapat digunakan untuk menuntun kehidupannya. Bahkan jika perlu beberapa persoalan masa kini yang berkembang dimasyarakat harus dapat dipahami oleh anggota pengajian.

 **F. Penanganan Korban Perlakuan Salah**

Pelayanan terpadu yang meliputi medis, medicolegal, hukum, konseling psikolog, rehabilitasi dan reintegrasi perlu dilakukan satu atap dan mendapatkan dana reguler. Sehingga tujuan pelayanan bagi korban perlakuan salah terutama kekerasan dapat benar-benar terpadu, cuma-cuma agar korban tidak semakin terbebani dan akses layanan mudah tidak perlu membawa korban kesana-kemari.

 **G. Kebijakan dan Anggaran Pemerintah**

Mengesahkan beberapa Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati untuk mendukung perlindungan anak dan perempuan dari segala bentuk perlakuan salah diantaranya berkaitan dengan isu :

* Kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak
* Perlindungan Pekerja Anak
* Perlindungan TKI dan keluarganya

Melakukan pembatasan iklan rokok dengan larangan perusahaan rokok untuk mensponsori kegiatan remaja, olah raga dan pendidikan. Konsekwensinya adalah CSR perusahaan lainnya yang telah banyak menggambil keuntungan di masyarakat Tulungagung, contohnya pabrik sepeda motor, barang elektronik yang omsetnya sangat banyak dipicu dengan komsumsi keluarga TKI.